

Perencanaan Pembelajaran Pkn



Oktana Wahyu Perdana, M.Pd.

2026

Perencanaan Pembelajaran PKn

Penulis

Oktana Wahyu Perdana, M.Pd.



Perencanaan Pembelajaran PKn

Penulis : Oktana Wahyu Perdana, M.Pd.
Layout : Prayitno
Cover : Oktana Wahyu Perdana, M.Pd
Editor : Reza Diapratama

Cetakan Pertama, Juli 2026
17 cm x 23 cm + vii + 115
ISBN : 978-623-8551-63-7

Penerbit :
UPY Press
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Unit 4 Lantai 4
Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Yogyakarta
Telp (0274) 376808, 373198, 418077, Fax (0274) 376808
Email: upypress@gmail.com
Web: upypress.upy.ac.id

®Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang
Dilarang memperbanyak karya tulisan ini tanpa izin tertulis dari
Penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga buku yang berjudul **“Perencanaan Pembelajaran PKN”** ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai salah satu upaya untuk memberikan referensi dan bahan kajian yang komprehensif mengenai perencanaan pembelajaran PPKn bagi mahasiswa, guru, calon guru, praktisi pendidikan, maupun pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap pengembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk warga negara yang cerdas, berkarakter, demokratis, serta memiliki komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam mencapai tujuan tersebut, perencanaan pembelajaran menjadi salah satu aspek yang sangat penting karena menentukan arah, proses, dan keberhasilan pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Perencanaan pembelajaran yang baik akan membantu guru dalam merancang pengalaman belajar yang bermakna, sistematis, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Buku ini membahas berbagai konsep dan praktik perencanaan pembelajaran PPKn, mulai dari hakikat

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, landasan filosofis pembelajaran, perkembangan kurikulum PPKn di Indonesia, penyusunan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran, pengembangan perangkat pembelajaran, strategi dan model pembelajaran, asesmen pembelajaran, hingga integrasi teknologi dalam perencanaan pembelajaran pada era digital. Materi yang disajikan diharapkan dapat membantu pembaca memahami secara utuh proses perencanaan pembelajaran yang relevan dengan tuntutan pendidikan abad ke-21.

Di tengah perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dinamika kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, guru dituntut untuk mampu merancang pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, serta pembentukan karakter peserta didik. Oleh karena itu, buku ini juga memberikan perhatian pada pemanfaatan teknologi pendidikan dan pengembangan kompetensi kewarganegaraan digital sebagai bagian dari inovasi pembelajaran PPKn.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang konstruktif dari para pembaca sangat diharapkan untuk penyempurnaan buku ini

pada masa yang akan datang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pendidikan, khususnya dalam bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta menjadi salah satu referensi yang bermanfaat dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di Indonesia.

Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan motivasi dalam proses penyusunan buku ini. Semoga segala kontribusi yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Tuhan Yang Maha Esa.

Yogyakarta, 11 Juni 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN BALIK JUDUL	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB 1 KONSEP DASAR PERENCANAAN PEMBELAJARAN	
PKn	1
A. Urgensi Memahami Konsep Dasar Pendidikan PPKn	1
B. Hakikat Pembelajaran PKn	4
C. Landasan Pembelajaran PKn	12
D. Komponen Pembelajaran PKn.....	15
E. Perangkat Pembelajaran	17
F. Rangkuman	18
BAB 2 HAKIKAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN	
PERKEMBANGAN KURIKULUM PPKn.....	21
A. Pendidikan Pancasila dan Perkembangan Kurikulum PPKn dalam Konteks Sosial-Politik	21
B. Hakikat Pendidikan Pancasila	24
C. Kurikulum Pembelajaran PPKn Masa Orde Lama	31
D. Kurikulum Pembelajaran PPKn Masa Orde Baru.....	38
E. Kurikulum Pembelajaran PPKn Masa Reformasi	45
BAB 3 KARAKTERISTIK PESERTA DIDIK DALAM	
PERENCANAAN PEMBELAJARAN	59

A. Pengertian Karakteristik Peserta Didik	59
B. Karakteristik Peserta Didik	61
C. Analisis Kebutuhan Belajar	63
D. Gaya Belajar Peserta Didik	65
E. Rangkuman	66
BAB 4 PEMANFAATAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN DALAM	
PERENCANAAN PEMBELAJARAN PPKn	69
A. Teknologi Pendidikan	69
B. Konsep Teknologi Pendidikan	72
C. Jenis-Jenis Teknologi Pendidikan	81
D. Integrasi Teknologi dalam Perencanaan Pembelajaran .	92
E. Rangkuman	100
BAB 5 PERENCANAAN PEMBELAJARAN BERBASIS NILAI,	
NORMA, DAN ETIKA PROFESI GURU	103
A. Perencanaan Pembelajaran	103
B. Profesionalisme Guru	106
C. Etika Profesi Guru	108
D. Perencanaan Pembelajaran Berbasis Etika Profesi.....	109
E. Rangkuman	111
Daftar Pustaka	113
Biodata Penulis	116

BAB 1

KONSEP DASAR PERENCANAAN PEMBELAJARAN PKN

A. Urgensi Memahami Konsep Dasar Pendidikan PPKn

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Perencanaan Pembelajaran PKN yaitu Mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep dasar pendidikan PPKn yang menjadi dasar perencanaan pembelajaran. Pendidikan merupakan salah satu sarana utama dalam membentuk karakter dan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, serta tanggung jawab sebagai warga negara. Melalui proses pendidikan yang terencana dan sistematis, peserta didik diharapkan mampu berkembang menjadi warga negara yang cerdas, berakarakter, serta memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Salah satu mata pelajaran yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan tujuan tersebut adalah

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Pendidikan PPKn berfungsi sebagai wahana untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila, menumbuhkan sikap nasionalisme, serta membentuk karakter warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pembelajaran PPKn tidak dapat dilaksanakan secara sembarangan, melainkan harus dirancang dan direncanakan secara matang agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif.



Gambar 1. Konsep Dasar Pendidikan PKn

Perencanaan pembelajaran merupakan salah satu kompetensi penting yang harus dimiliki oleh seorang guru. Melalui perencanaan pembelajaran yang baik, guru dapat merancang proses pembelajaran yang sistematis, terarah, serta sesuai dengan karakteristik peserta didik dan tujuan

pendidikan yang ingin dicapai. Dalam konteks pembelajaran PPKn, perencanaan pembelajaran tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi, tetapi juga pada pembentukan sikap, nilai, dan perilaku yang mencerminkan karakter warga negara yang baik.

Namun demikian, sebelum seorang calon guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran yang efektif, terlebih dahulu perlu memahami konsep-konsep dasar yang menjadi landasan dalam pendidikan PPKn. Pemahaman terhadap konsep dasar ini sangat penting karena akan memengaruhi cara guru dalam menentukan tujuan pembelajaran, memilih materi, merancang strategi pembelajaran, serta menentukan metode dan media yang tepat dalam proses pembelajaran.

Bab ini membahas berbagai konsep dasar pendidikan PPKn yang menjadi fondasi dalam merancang perencanaan pembelajaran. Pembahasan dalam bab ini meliputi pengertian pendidikan PPKn, tujuan dan fungsi pendidikan PPKn, ruang lingkup kajian PPKn, serta prinsip-prinsip dasar dalam pembelajaran PPKn. Dengan memahami konsep-konsep tersebut, mahasiswa diharapkan memiliki landasan teoretis yang kuat dalam menyusun perencanaan pembelajaran PPKn yang efektif, relevan, dan mampu menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada peserta didik.

Melalui pembahasan pada bab ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami konsep dasar pendidikan PPKn secara teoretis, tetapi juga mampu melihat keterkaitannya dengan praktik perencanaan pembelajaran di kelas. Pemahaman tersebut akan menjadi dasar penting bagi mahasiswa dalam mempelajari materi-materi pada bab selanjutnya yang berkaitan dengan perencanaan pembelajaran PPKn secara lebih komprehensif dan aplikatif. Dengan demikian, bab ini menjadi langkah awal yang penting dalam memahami bagaimana merancang pembelajaran PPKn yang bermakna, kontekstual, dan mampu membentuk karakter warga negara yang baik.

B. Hakikat Pembelajaran PKn

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn) merupakan proses pendidikan yang bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembelajaran PKn tidak hanya berfokus pada aspek kognitif semata, tetapi juga mencakup pembentukan karakter, sikap, dan perilaku yang

mencerminkan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari (Sapriya, 2017).

Hakikat pembelajaran PKn dapat dipahami sebagai proses pendidikan yang berorientasi pada pembentukan *good citizen* atau warga negara yang baik. Warga negara yang baik adalah individu yang memiliki kesadaran terhadap hak dan kewajiban, memiliki sikap nasionalisme, menghargai keberagaman, serta mampu berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan demokratis. Oleh karena itu, pembelajaran PKn harus dirancang secara sistematis agar mampu menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan kepada peserta didik (Winataputra, 2015).

Menurut Sapriya (2017), Pendidikan Kewarganegaraan merupakan program pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan karakter kewarganegaraan yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pembelajaran PKn tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai wahana pembentukan karakter dan penguatan nilai-nilai kebangsaan.

Dalam konteks pendidikan nasional, pembelajaran PKn memiliki peran strategis dalam memperkuat identitas nasional serta menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada

generasi muda. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang menegaskan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003).

Dengan demikian, hakikat pembelajaran PKn dapat dipahami sebagai suatu proses pendidikan yang menekankan pada pengembangan pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*) yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila (Budimansyah & Suryadi, 2008).

Hakikat pembelajaran PKn tidak dapat dipisahkan dari tiga dimensi utama yang menjadi fondasi pendidikan kewarganegaraan, yaitu dimensi pengetahuan, keterampilan, dan karakter kewarganegaraan. Ketiga dimensi tersebut saling berkaitan dan harus dikembangkan secara terpadu dalam proses pembelajaran.

Dimensi pertama adalah **pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*)**. Dimensi ini mencakup pemahaman peserta didik terhadap berbagai konsep dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti Pancasila,

konstitusi, hak asasi manusia, demokrasi, sistem pemerintahan, hukum, serta berbagai isu kewarganegaraan yang berkembang di masyarakat. Pengetahuan kewarganegaraan menjadi landasan bagi peserta didik untuk memahami posisi dan perannya sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dimensi kedua adalah **keterampilan kewarganegaraan (civic skills)**. Keterampilan ini mencakup kemampuan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah sosial, kemampuan berkomunikasi secara efektif, kemampuan berpartisipasi dalam kegiatan demokratis, serta kemampuan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, keterampilan kewarganegaraan menjadi semakin penting agar peserta didik mampu menghadapi berbagai tantangan sosial, politik, ekonomi, dan budaya secara bijaksana.

Dimensi ketiga adalah **karakter kewarganegaraan (civic dispositions)**. Karakter kewarganegaraan berkaitan dengan nilai, sikap, dan kebiasaan yang mencerminkan perilaku warga negara yang baik. Nilai-nilai tersebut antara lain kejujuran, tanggung jawab, disiplin, toleransi, gotong royong, cinta tanah air, menghormati hukum, serta

menghargai keberagaman. Pembentukan karakter kewarganegaraan merupakan tujuan utama pembelajaran PKn karena keberhasilan pendidikan kewarganegaraan tidak hanya diukur dari penguasaan materi, tetapi juga dari perubahan sikap dan perilaku peserta didik.

PKn sebagai Pendidikan Nilai dan Karakter

Secara filosofis, PKn merupakan bagian dari pendidikan nilai (*value education*) dan pendidikan karakter (*character education*). Pendidikan nilai bertujuan untuk membantu peserta didik memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam kehidupan. Sementara itu, pendidikan karakter berfokus pada pembentukan kebiasaan positif yang tercermin dalam perilaku sehari-hari.

Dalam pembelajaran PKn, nilai-nilai yang dikembangkan bersumber dari Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Setiap sila Pancasila mengandung nilai-nilai yang harus ditanamkan kepada peserta didik. Nilai Ketuhanan mengajarkan keimanan dan toleransi antarumat beragama. Nilai kemanusiaan mengajarkan penghormatan terhadap martabat manusia. Nilai Persatuan menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan. Nilai Kerakyatan

mengembangkan sikap demokratis dan musyawarah. Sedangkan nilai Keadilan Sosial menumbuhkan kepedulian terhadap sesama dan semangat mewujudkan kesejahteraan bersama.

Melalui pendidikan nilai dan karakter, pembelajaran PKn diharapkan mampu membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral dan komitmen kebangsaan yang kuat. Hal ini sangat penting mengingat berbagai tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, seperti menurunnya rasa nasionalisme, maraknya perilaku intoleran, penyalahgunaan teknologi digital, serta berbagai bentuk pelanggaran hukum dan etika sosial.

Perkembangan globalisasi dan revolusi industri 4.0 membawa dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang pendidikan. Arus informasi yang sangat cepat melalui internet dan media sosial memberikan berbagai peluang sekaligus tantangan bagi peserta didik. Di satu sisi, peserta didik dapat memperoleh informasi dan pengetahuan dari berbagai sumber secara mudah. Namun di sisi lain, mereka juga berpotensi terpapar informasi yang tidak benar, ujaran kebencian, radikalisme, hoaks, serta berbagai pengaruh negatif lainnya.

Dalam konteks tersebut, pembelajaran PKn memiliki peran penting dalam membekali peserta didik dengan kemampuan literasi digital dan kecakapan kewarganegaraan digital (*digital citizenship*). Peserta didik perlu dibimbing agar mampu menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, menghargai hak orang lain di ruang digital, menjaga etika dalam berkomunikasi, serta mampu menyaring informasi secara kritis.

Konsep kewarganegaraan digital menjadi salah satu pengembangan penting dalam pembelajaran PKn modern. Warga negara digital yang baik adalah individu yang mampu memanfaatkan teknologi secara produktif, bertanggung jawab, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam interaksi di dunia maya. Oleh karena itu, guru PKn perlu mengintegrasikan isu-isu digital dalam proses pembelajaran agar peserta didik memiliki kesiapan menghadapi kehidupan masyarakat digital.

Pemahaman terhadap hakikat pembelajaran PKn memiliki implikasi penting dalam penyusunan perencanaan pembelajaran. Guru tidak cukup hanya merancang kegiatan yang berorientasi pada penguasaan materi, tetapi juga harus merancang pengalaman belajar yang mampu mengembangkan keterampilan dan karakter kewarganegaraan peserta didik.

Perencanaan pembelajaran PKn harus memperhatikan keseimbangan antara aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Guru perlu memilih model pembelajaran yang mendorong partisipasi aktif peserta didik, seperti *Problem Based Learning*, *Project Based Learning*, *Inquiry Learning*, dan pembelajaran berbasis diskusi. Melalui model-model tersebut, peserta didik dapat belajar memahami permasalahan kewarganegaraan secara kontekstual sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan demokratis.

Selain itu, evaluasi pembelajaran PKn juga harus dilakukan secara komprehensif. Penilaian tidak hanya difokuskan pada aspek kognitif melalui tes tertulis, tetapi juga mencakup penilaian sikap dan keterampilan melalui observasi, penugasan, proyek, portofolio, dan refleksi diri. Dengan demikian, hasil pembelajaran PKn dapat mencerminkan perkembangan peserta didik secara utuh.

Pada akhirnya, hakikat pembelajaran PKn adalah membentuk warga negara yang cerdas, terampil, berkarakter, dan bertanggung jawab. Melalui pembelajaran yang direncanakan secara baik, peserta didik diharapkan mampu menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, serta berpartisipasi aktif

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, PKn menjadi salah satu instrumen strategis dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan membangun peradaban bangsa yang bermartabat.

C. Landasan Pembelajaran PKn

Pelaksanaan pembelajaran PKn tidak terlepas dari berbagai landasan yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pendidikan. Landasan tersebut berfungsi sebagai pijakan dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran agar sesuai dengan tujuan pendidikan nasional (Sanjaya, 2015).

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis pembelajaran PKn bersumber dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila menjadi dasar dalam pengembangan nilai-nilai moral, etika, dan karakter yang harus ditanamkan kepada peserta didik melalui proses pendidikan (Winataputra, 2015).

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial menjadi pedoman dalam

penyelenggaraan pembelajaran PKn. Oleh karena itu, pembelajaran PKn harus mampu menginternalisasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan peserta didik (Sapriya, 2017).

2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis pembelajaran PKn bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional. Pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian penting dari sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air (Winataputra, 2015).

Beberapa regulasi yang menjadi landasan hukum pembelajaran PKn antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Landasan yuridis tersebut menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem pendidikan nasional sebagai

sarana untuk membentuk karakter bangsa (Budimansyah & Suryadi, 2008).

3. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis pembelajaran PKn berkaitan dengan kondisi masyarakat yang terus berkembang dan semakin kompleks. Indonesia sebagai negara yang memiliki keberagaman suku, agama, ras, dan budaya memerlukan pendidikan yang mampu menanamkan nilai toleransi, persatuan, dan semangat kebangsaan kepada generasi muda (Sapriya, 2017).

Melalui pembelajaran PKn, peserta didik diharapkan mampu memahami realitas sosial yang ada di masyarakat serta memiliki kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan demokratis (Winataputra, 2015).

4. Landasan Pedagogis

Landasan pedagogis berkaitan dengan prinsip-prinsip pendidikan yang menekankan bahwa pembelajaran harus berorientasi pada perkembangan peserta didik. Guru perlu memahami karakteristik peserta didik agar dapat merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik (Sanjaya, 2015).

Dalam pembelajaran PKn, pendekatan pembelajaran yang digunakan hendaknya mampu mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, berdiskusi, serta berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran (Trianto, 2014).

D. Komponen Pembelajaran PKn

Pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berkaitan dan saling memengaruhi. Agar proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif, setiap komponen pembelajaran harus dirancang dan dikelola dengan baik (Sanjaya, 2015).

1. Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran merupakan arah yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran PKn, tujuan pembelajaran tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi, tetapi juga pada pembentukan sikap dan karakter peserta didik sebagai warga negara yang baik (Sapriya, 2017).

2. Materi Pembelajaran

Materi pembelajaran merupakan isi atau substansi yang dipelajari oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Materi dalam pembelajaran PKn mencakup berbagai konsep yang berkaitan dengan Pancasila, konstitusi,

demokrasi, hak asasi manusia, serta kehidupan berbangsa dan bernegara (Budimansyah & Suryadi, 2008).

3. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Dalam pembelajaran PKn, metode yang digunakan sebaiknya bersifat partisipatif dan mendorong keterlibatan aktif peserta didik, seperti diskusi, debat, studi kasus, dan pembelajaran berbasis masalah (Trianto, 2014).

4. Media Pembelajaran

Media pembelajaran merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk membantu proses penyampaian materi pembelajaran. Penggunaan media yang tepat dapat membantu peserta didik memahami materi secara lebih mudah dan menarik (Sanjaya, 2015).

5. Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi pembelajaran merupakan proses untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Evaluasi dalam pembelajaran PKn dapat dilakukan melalui berbagai bentuk penilaian seperti tes tertulis, observasi sikap, penilaian proyek, dan portofolio (Trianto, 2014).

E. Perangkat Pembelajaran

Perangkat pembelajaran merupakan berbagai dokumen atau alat yang disusun oleh guru untuk mendukung pelaksanaan proses pembelajaran di kelas. Perangkat pembelajaran berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran secara sistematis dan terarah (Sanjaya, 2015).

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) atau Modul Ajar

RPP atau modul ajar merupakan rencana kegiatan pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk satu pertemuan atau lebih. Dokumen ini memuat tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, serta penilaian pembelajaran (Trianto, 2014).

2. Bahan Ajar

Bahan ajar merupakan materi pembelajaran yang digunakan oleh guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Bahan ajar dapat berupa buku teks, modul, handout, maupun sumber belajar digital (Sanjaya, 2015).

3. Media Pembelajaran

Media pembelajaran merupakan alat yang digunakan untuk membantu penyampaian materi pembelajaran

agar lebih menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik (Trianto, 2014).

4. Instrumen Penilaian

Instrumen penilaian merupakan alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Instrumen penilaian dapat berupa soal tes, lembar observasi, rubrik penilaian, maupun tugas proyek (Sanjaya, 2015). Dengan adanya perangkat pembelajaran yang lengkap dan terencana dengan baik, proses pembelajaran PKn dapat berlangsung secara lebih efektif, sistematis, dan mampu mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.

F. Rangkuman

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn) merupakan proses pendidikan yang bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi warga negara yang cerdas, demokratis, serta bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hakikat pembelajaran PKn tidak hanya menekankan pada penguasaan pengetahuan kewarganegaraan, tetapi juga pada pengembangan keterampilan dan pembentukan karakter kewarganegaraan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, pembelajaran PKn memiliki peran penting dalam membentuk warga negara yang memiliki kesadaran terhadap hak dan kewajibannya serta mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokratis.

Pelaksanaan pembelajaran PKn didasarkan pada beberapa landasan penting, yaitu landasan filosofis, yuridis, sosiologis, dan pedagogis. Landasan filosofis bersumber dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Landasan yuridis berkaitan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem pendidikan nasional, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sementara itu, landasan sosiologis berkaitan dengan kondisi masyarakat yang majemuk dan dinamis sehingga memerlukan pendidikan yang mampu menanamkan nilai toleransi, persatuan, dan semangat kebangsaan. Adapun landasan pedagogis menekankan pentingnya pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan peserta didik serta penggunaan strategi pembelajaran yang aktif dan partisipatif.

Dalam proses pembelajaran PKn terdapat beberapa komponen yang saling berkaitan dan memengaruhi

keberhasilan pembelajaran. Komponen tersebut meliputi tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran. Tujuan pembelajaran menjadi arah yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran, sedangkan materi pembelajaran merupakan substansi pengetahuan yang harus dipelajari oleh peserta didik. Metode dan media pembelajaran digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan materi secara efektif dan menarik, sementara evaluasi pembelajaran berfungsi untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajaran.

Agar proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan sistematis, guru perlu menyusun perangkat pembelajaran sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Perangkat pembelajaran tersebut meliputi rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar, bahan ajar, media pembelajaran, serta instrumen penilaian. Melalui penyusunan perangkat pembelajaran yang baik dan terencana, proses pembelajaran PKN diharapkan dapat berlangsung secara lebih terarah, efektif, serta mampu mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.

BAB 2

HAKIKAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN PERKEMBANGAN KURIKULUM PPKn

A. Pendidikan Pancasila dan Perkembangan Kurikulum PPKn dalam Konteks Sosial-Politik

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Perencanaan Pembelajaran PKn yaitu Mahasiswa mampu menganalisis hubungan antara pendidikan Pancasila dan sistem sosial-politik dalam perencanaan pembelajaran. Pendidikan Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, Pancasila mengandung nilai-nilai fundamental yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila perlu ditanamkan secara sistematis melalui proses pendidikan agar dapat membentuk generasi yang memiliki karakter kebangsaan, sikap nasionalisme, serta kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Salah satu sarana yang digunakan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila tersebut adalah melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Pembelajaran PPKn tidak hanya bertujuan untuk

memberikan pengetahuan mengenai konsep-konsep kewarganegaraan, tetapi juga berperan dalam membentuk sikap dan karakter peserta didik agar mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan PPKn memiliki fungsi strategis dalam membangun karakter bangsa serta memperkuat identitas nasional.



Gambar 2. Perkembangan Kurikulum di Indonesia

Dalam perkembangannya, pembelajaran PPKn di Indonesia mengalami berbagai perubahan yang dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, dan perkembangan sistem pendidikan nasional. Perubahan tersebut tercermin dalam perkembangan kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang terus mengalami

penyempurnaan dari masa ke masa. Setiap periode pemerintahan memiliki kebijakan pendidikan yang berbeda sehingga memengaruhi orientasi dan pendekatan pembelajaran PPKn di sekolah.

Pada masa Orde Lama, pendidikan kewarganegaraan lebih diarahkan untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan kesadaran kebangsaan sebagai bagian dari upaya membangun identitas bangsa yang baru merdeka. Selanjutnya pada masa Orde Baru, pembelajaran pendidikan kewarganegaraan lebih menekankan pada penanaman nilai-nilai Pancasila melalui mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Sementara itu, pada masa Reformasi pembelajaran PPKn mengalami pembaruan dengan menekankan pada pengembangan kompetensi kewarganegaraan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan karakter kewarganegaraan dalam kehidupan demokratis.

Bab ini membahas mengenai hakikat pendidikan Pancasila serta perkembangan kurikulum pembelajaran PPKn di Indonesia dari masa ke masa, yaitu pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa Reformasi. Pembahasan ini penting untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai dinamika perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia serta bagaimana perubahan

kebijakan pendidikan memengaruhi arah dan tujuan pembelajaran PPKn.

Melalui pembahasan pada bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar pendidikan Pancasila serta menganalisis perkembangan kurikulum pembelajaran PPKn dalam konteks sosial dan politik yang melatarbelakanginya. Pemahaman tersebut diharapkan dapat menjadi landasan bagi mahasiswa dalam merancang perencanaan pembelajaran PPKn yang relevan dengan perkembangan pendidikan dan kebutuhan masyarakat saat ini.

B. Hakikat Pendidikan Pancasila

Pendidikan Pancasila merupakan proses pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik agar dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai fundamental yang menjadi landasan dalam membangun karakter dan identitas nasional. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang memiliki sikap nasionalisme, cinta tanah air,

serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi (Kaelan, 2016).

Hakikat pendidikan Pancasila tidak hanya berkaitan dengan pemahaman terhadap konsep-konsep Pancasila secara teoritis, tetapi juga berkaitan dengan proses internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendidikan Pancasila, peserta didik diharapkan mampu mengembangkan sikap moral dan etika yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia (Winarno, 2013).

Menurut Kaelan (2016), pendidikan Pancasila bertujuan untuk membentuk warga negara yang memiliki kesadaran moral, kesadaran hukum, serta kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, pendidikan Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembelajaran pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter bangsa.

Dalam konteks pendidikan nasional, pendidikan Pancasila memiliki peran strategis dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Melalui pendidikan Pancasila, peserta didik diharapkan mampu memahami nilai persatuan, toleransi, dan keadilan sosial sehingga dapat

hidup secara harmonis dalam masyarakat yang majemuk (Sapriya, 2017).

Pancasila sebagai Dasar Filosofis Pendidikan

Pancasila merupakan dasar filosofis bangsa Indonesia yang lahir dari nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan pengalaman historis bangsa. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila memberikan arah dan tujuan bagi seluruh aktivitas masyarakat Indonesia, termasuk dalam bidang pendidikan.

Pendidikan Pancasila berlandaskan pada keyakinan bahwa manusia Indonesia harus berkembang secara utuh dan seimbang, baik dalam aspek spiritual, intelektual, emosional, sosial, maupun moral. Oleh karena itu, proses pendidikan tidak hanya diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Dalam perspektif pendidikan nasional, Pancasila menjadi fondasi dalam membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, memiliki semangat

persatuan, bersikap demokratis, serta memiliki kepedulian terhadap keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut menjadi tujuan utama yang harus dicapai melalui proses pendidikan Pancasila.

Hakikat pendidikan Pancasila dapat dipahami melalui beberapa dimensi utama yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain.

1. Dimensi Pengetahuan (Cognitive Dimension)

Dimensi pengetahuan berkaitan dengan pemahaman peserta didik terhadap konsep, sejarah, kedudukan, fungsi, dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Peserta didik perlu memahami proses lahirnya Pancasila, makna setiap sila, serta relevansi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pemahaman tersebut menjadi dasar bagi peserta didik untuk mengembangkan kesadaran akan pentingnya Pancasila sebagai identitas nasional dan ideologi negara. Tanpa pemahaman yang memadai, peserta didik akan kesulitan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

2. Dimensi Sikap dan Nilai (Affective Dimension)

Dimensi sikap berkaitan dengan penghayatan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pendidikan Pancasila harus mampu menumbuhkan rasa cinta tanah air, semangat kebangsaan, toleransi, tanggung jawab, kejujuran, dan kepedulian sosial.

Melalui dimensi afektif, peserta didik tidak hanya mengetahui nilai-nilai Pancasila, tetapi juga memiliki komitmen untuk menjadikannya sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Pengembangan sikap ini sangat penting karena keberhasilan pendidikan Pancasila tidak hanya diukur dari aspek pengetahuan, tetapi juga dari perubahan perilaku peserta didik.

3. Dimensi Perilaku (Psychomotor and Behavioral Dimension)

Dimensi perilaku menekankan pada kemampuan peserta didik dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Nilai-nilai yang telah dipahami dan dihayati harus diwujudkan dalam bentuk tindakan yang mencerminkan karakter Pancasila.

Contohnya, peserta didik menunjukkan sikap toleransi terhadap teman yang berbeda agama, ikut menjaga kebersihan lingkungan sekolah sebagai bentuk tanggung jawab sosial, berpartisipasi dalam kegiatan musyawarah kelas, serta menghormati aturan yang berlaku di sekolah maupun masyarakat. Implementasi

nilai-nilai tersebut merupakan indikator penting keberhasilan pendidikan Pancasila.

Setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai yang harus diinternalisasikan melalui proses pendidikan.

1. Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

Nilai yang terkandung dalam sila pertama meliputi keimanan, ketakwaan, toleransi beragama, dan penghormatan terhadap kebebasan beribadah. Pendidikan Pancasila harus menanamkan kesadaran bahwa kehidupan berbangsa yang harmonis hanya dapat terwujud apabila masyarakat saling menghormati perbedaan keyakinan dan menjalankan kehidupan berdasarkan nilai-nilai moral yang baik.

2. Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua mengajarkan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Pendidikan Pancasila harus membentuk peserta didik yang memiliki empati, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menolak segala bentuk diskriminasi, dan menghormati sesama tanpa memandang latar belakang sosial, budaya, maupun agama.

3. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

Nilai persatuan menjadi fondasi penting dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia yang majemuk.

Pendidikan Pancasila harus mampu menumbuhkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia, cinta tanah air, dan kesediaan untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman. Peserta didik perlu memahami bahwa keberagaman bukanlah sumber perpecahan, melainkan kekayaan bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila harus mengembangkan sikap inklusif dan menghargai perbedaan.

4. Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan

Sila keempat mengajarkan nilai demokrasi, musyawarah, partisipasi, dan penghormatan terhadap pendapat orang lain. Melalui pendidikan Pancasila, peserta didik dibiasakan untuk berdiskusi, menyampaikan pendapat secara santun, menerima kritik secara terbuka, serta mengambil keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Nilai demokrasi yang diajarkan dalam pendidikan Pancasila bukan hanya demokrasi prosedural, tetapi juga demokrasi yang menjunjung tinggi etika, tanggung jawab, dan kepentingan bersama.

5. Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima mengandung nilai keadilan, kesejahteraan, solidaritas sosial, dan kepedulian terhadap sesama. Pendidikan Pancasila harus menumbuhkan kesadaran bahwa setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat. Peserta didik perlu dibimbing untuk memiliki kepedulian terhadap masalah sosial, menghargai kerja keras, mengembangkan semangat gotong royong, serta berkontribusi dalam menciptakan kehidupan yang lebih adil dan sejahtera.

C. Kurikulum Pembelajaran PPKn Masa Orde Lama

Periode Orde Lama (1945–1966) merupakan fase awal pembangunan sistem pendidikan nasional Indonesia setelah memperoleh kemerdekaan. Pada masa ini, pendidikan dipandang sebagai instrumen strategis untuk membangun identitas nasional, memperkuat persatuan bangsa, dan menanamkan semangat patriotisme kepada seluruh warga negara. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang masih belum stabil pascakemerdekaan menjadikan

pendidikan sebagai sarana penting dalam membentuk karakter bangsa yang merdeka dan berdaulat.

Pada masa Orde Lama, sistem pendidikan Indonesia masih berada dalam tahap penyesuaian dan pencarian bentuk yang sesuai dengan cita-cita bangsa. Kurikulum yang diterapkan mengalami beberapa perubahan sebagai respons terhadap dinamika politik dan kebutuhan pembangunan nasional. Pendidikan kewarganegaraan pada masa ini diarahkan untuk menanamkan kesadaran berbangsa, semangat nasionalisme, dan kecintaan terhadap tanah air sebagai fondasi utama kehidupan bernegara (Winarno, 2013).

Pemerintah menyadari bahwa kemerdekaan yang telah diperoleh harus dipertahankan melalui pembentukan warga negara yang memiliki kesadaran nasional yang kuat. Oleh karena itu, berbagai kebijakan pendidikan yang diterapkan pada masa Orde Lama selalu menempatkan pendidikan kebangsaan sebagai salah satu prioritas utama. Pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga membentuk warga negara yang memiliki loyalitas terhadap negara dan siap berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

Pada awal kemerdekaan, Indonesia masih menggunakan sebagian sistem pendidikan peninggalan

kolonial Belanda dan Jepang. Namun, pemerintah berupaya melakukan berbagai penyesuaian agar sistem pendidikan lebih mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah memasukkan materi-materi kebangsaan ke dalam kurikulum sekolah.

Pendidikan pada masa ini memiliki misi untuk membentuk manusia Indonesia yang merdeka secara fisik maupun mental. Oleh karena itu, nilai-nilai perjuangan, patriotisme, nasionalisme, dan semangat mempertahankan kemerdekaan menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran. Pendidikan kewarganegaraan mulai mendapatkan perhatian sebagai sarana untuk membangun kesadaran politik dan identitas nasional peserta didik.

Dalam berbagai dokumen pendidikan pada masa awal kemerdekaan, pendidikan kewarganegaraan belum berdiri sebagai mata pelajaran yang utuh seperti saat ini. Materi mengenai kewarganegaraan masih terintegrasi dalam berbagai mata pelajaran lain yang membahas sejarah perjuangan bangsa, konstitusi, dan kehidupan kenegaraan.

Perkembangan penting dalam pendidikan kewarganegaraan terjadi ketika pemerintah memperkenalkan mata pelajaran **Civics** dalam Kurikulum 1957. Mata pelajaran ini merupakan bentuk awal pendidikan kewarganegaraan yang

secara khusus dirancang untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai kehidupan bernegara.

Civics bertujuan untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan tentang hak dan kewajiban warga negara, sistem pemerintahan Indonesia, struktur lembaga negara, serta berbagai aspek kehidupan demokrasi. Melalui mata pelajaran ini, peserta didik diharapkan memiliki pemahaman yang baik mengenai posisi dan peran mereka sebagai warga negara Indonesia (Winataputra, 2015).

Istilah Civics sendiri banyak dipengaruhi oleh perkembangan pendidikan kewarganegaraan di negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat. Namun demikian, implementasi Civics di Indonesia disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan politik nasional. Materi yang diajarkan lebih menekankan pada pembentukan rasa cinta tanah air, penghormatan terhadap konstitusi, dan kesadaran untuk menjaga persatuan bangsa.

Selain memberikan pengetahuan mengenai sistem kenegaraan, Civics juga diarahkan untuk membangun sikap patriotik dan semangat pengabdian kepada negara. Hal ini sangat relevan mengingat Indonesia pada masa itu masih menghadapi berbagai ancaman terhadap keutuhan negara, baik dari dalam maupun luar negeri.

Perkembangan berikutnya terjadi dengan lahirnya Kurikulum 1964 yang memperkenalkan mata pelajaran **Pendidikan Kewargaan Negara (PKN)**. Kurikulum ini lahir dalam konteks politik Demokrasi Terpimpin yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Pada masa tersebut, pendidikan diarahkan untuk mendukung pembangunan karakter bangsa sesuai dengan semangat revolusi yang berkembang.

Pendidikan Kewargaan Negara dalam Kurikulum 1964 tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan mengenai kehidupan bernegara, tetapi juga menanamkan nilai-nilai ideologis dan semangat revolusioner kepada peserta didik. Kurikulum ini menekankan pentingnya pembentukan manusia Indonesia yang memiliki kesadaran nasional, semangat perjuangan, serta komitmen terhadap cita-cita bangsa.

Salah satu ciri khas Kurikulum 1964 adalah penerapan konsep **Pancawardhana**. Konsep ini menekankan pengembangan peserta didik secara menyeluruh melalui lima aspek utama, yaitu:

1. Perkembangan moral.
2. Perkembangan kecerdasan.
3. Perkembangan emosional atau artistik.
4. Perkembangan keterampilan (*keprigelan*).
5. Perkembangan jasmani.

Konsep Pancawardhana menunjukkan bahwa pendidikan pada masa Orde Lama tidak hanya berorientasi pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan kepribadian dan karakter peserta didik secara utuh (Tilaar, 2002).

Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, pendekatan ini memberikan ruang yang lebih luas untuk pengembangan nilai-nilai kebangsaan, semangat gotong royong, rasa tanggung jawab sosial, dan kesadaran politik peserta didik. Pendidikan tidak hanya bertujuan menghasilkan individu yang cerdas, tetapi juga warga negara yang memiliki loyalitas terhadap bangsa dan negara.

Perkembangan kurikulum pendidikan kewarganegaraan pada masa Orde Lama tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik yang terjadi saat itu. Pendidikan menjadi salah satu instrumen negara dalam membangun ideologi nasional dan memperkuat legitimasi politik pemerintah.

Pada masa Demokrasi Liberal (1950–1959), pendidikan kewarganegaraan lebih menekankan pada pemahaman demokrasi, konstitusi, dan hak-hak warga negara. Namun setelah memasuki masa Demokrasi Terpimpin (1959–1965), orientasi pendidikan mulai

bergeser ke arah pembentukan manusia yang memiliki komitmen terhadap revolusi dan pembangunan nasional sesuai dengan arah kebijakan pemerintah.

Akibatnya, materi pendidikan kewarganegaraan pada masa tersebut tidak hanya memuat aspek-aspek kenegaraan, tetapi juga berbagai konsep politik yang berkembang pada masa itu. Kurikulum menjadi sarana untuk membentuk pola pikir dan sikap peserta didik agar sejalan dengan ideologi yang dianut negara.

Meskipun demikian, tujuan utama pendidikan kewarganegaraan tetap berfokus pada pembentukan warga negara yang memiliki kesadaran kebangsaan, rasa cinta tanah air, dan semangat mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Secara umum, pendidikan kewarganegaraan pada masa Orde Lama memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu:

1. **Berorientasi pada nasionalisme dan patriotisme.**

Pembelajaran diarahkan untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan semangat mempertahankan kemerdekaan.

2. **Menekankan pembentukan identitas nasional.**

Pendidikan digunakan sebagai sarana untuk membangun kesadaran bahwa Indonesia adalah bangsa yang merdeka dan berdaulat.

3. **Dipengaruhi oleh dinamika politik dan ideologi negara.**

Materi pembelajaran sering kali disesuaikan dengan arah kebijakan politik pemerintah yang sedang berkuasa.

4. **Berfokus pada pembentukan karakter bangsa.**

Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya mengajarkan pengetahuan tentang negara, tetapi juga nilai-nilai moral dan kebangsaan.

5. **Mengintegrasikan aspek moral dan sosial.**

Pembelajaran menekankan pentingnya gotong royong, persatuan, tanggung jawab sosial, dan pengabdian kepada bangsa.

D. Kurikulum Pembelajaran PPKn Masa Orde Baru

Masa Orde Baru (1966–1998) merupakan periode penting dalam sejarah pendidikan Indonesia, termasuk dalam perkembangan pendidikan kewarganegaraan. Setelah berakhirnya masa Orde Lama, pemerintah Orde Baru melakukan berbagai perubahan dalam sistem politik, ekonomi, dan pendidikan dengan tujuan menciptakan stabilitas nasional serta mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Dalam konteks tersebut, pendidikan dipandang sebagai instrumen strategis untuk

membentuk warga negara yang memiliki loyalitas terhadap negara, memahami ideologi Pancasila, serta mendukung agenda pembangunan yang dijalankan pemerintah.

Pada masa ini, Pancasila ditempatkan sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh aspek kehidupan nasional harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan diarahkan untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai media pembentukan sikap dan perilaku warga negara yang sesuai dengan nilai-nilai yang ditetapkan oleh pemerintah (Winarno, 2013).

Peran pendidikan kewarganegaraan pada masa Orde Baru sangat strategis karena dianggap mampu menjaga stabilitas politik, memperkuat persatuan bangsa, dan membentuk generasi muda yang memiliki komitmen terhadap pembangunan nasional. Melalui kurikulum yang diterapkan, pemerintah berupaya menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan ideologi negara secara sistematis kepada peserta didik sejak pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

1. Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan Masa Orde Baru

Lahirnya pendidikan kewarganegaraan pada masa Orde Baru tidak dapat dilepaskan dari kondisi politik pasca peristiwa tahun 1965 yang mengakibatkan terjadinya perubahan besar dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto menekankan pentingnya stabilitas politik sebagai syarat utama keberhasilan pembangunan nasional.

Dalam situasi tersebut, pendidikan dijadikan sebagai sarana untuk membangun kesadaran ideologis masyarakat terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah memandang bahwa generasi muda harus dibekali dengan pemahaman yang kuat mengenai dasar negara agar tidak mudah terpengaruh oleh ideologi yang dianggap bertentangan dengan Pancasila.

Pendidikan kewarganegaraan pada masa ini tidak hanya bertujuan membentuk warga negara yang memahami sistem ketatanegaraan, tetapi juga warga negara yang memiliki kesetiaan kepada negara, patuh terhadap hukum, serta mendukung program-program pembangunan nasional. Oleh karena itu, kurikulum

pendidikan kewarganegaraan dirancang untuk menanamkan nilai-nilai ideologis secara terstruktur dan berkelanjutan.

2. Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dalam Kurikulum 1975

Perubahan penting dalam pendidikan kewarganegaraan terjadi dengan diberlakukannya Kurikulum 1975. Dalam kurikulum ini, mata pelajaran kewarganegaraan dikenal dengan nama **Pendidikan Moral Pancasila (PMP)**.

PMP dirancang sebagai mata pelajaran yang bertujuan membentuk sikap, perilaku, dan karakter peserta didik berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Fokus utama pembelajaran bukan hanya pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan moral dan kepribadian peserta didik agar sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia (Sapriya, 2017).

Materi Pendidikan Moral Pancasila banyak mengacu pada Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang ditetapkan pemerintah sebagai pedoman resmi dalam memahami dan mengamalkan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila dijabarkan ke dalam butir-butir pengamalan yang harus dipahami dan

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui PMP, peserta didik diajarkan berbagai sikap positif seperti:

- a. Taat kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Menghormati sesama manusia.
- c. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
- d. Mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan.
- e. Bersikap adil dan bertanggung jawab.
- f. Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan.

3. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)

Salah satu ciri khas pendidikan kewarganegaraan pada masa Orde Baru adalah penggunaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) sebagai landasan utama pembelajaran. P4 ditetapkan melalui Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 dan berisi 36 butir pengamalan Pancasila yang menjadi pedoman perilaku warga negara.

P4 digunakan secara luas dalam berbagai jenjang pendidikan maupun pelatihan masyarakat. Peserta didik tidak hanya mempelajari sila-sila Pancasila secara konseptual, tetapi juga diwajibkan memahami berbagai bentuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui pendekatan ini, pemerintah berharap masyarakat memiliki pemahaman yang seragam mengenai makna Pancasila. Pancasila diposisikan sebagai pedoman utama dalam kehidupan pribadi, sosial, maupun kenegaraan.

Meskipun demikian, pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran P4 sering kali lebih menekankan aspek hafalan dan kepatuhan dibandingkan pengembangan kemampuan berpikir kritis. Akibatnya, peserta didik cenderung menerima nilai-nilai yang diajarkan tanpa diberikan ruang yang cukup untuk melakukan refleksi dan analisis secara mendalam.

4. Perubahan Menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) pada Kurikulum 1994

Perkembangan berikutnya terjadi pada penerapan Kurikulum 1994 yang mengubah nama mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila menjadi **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)**.

Perubahan nomenklatur ini menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk memperluas cakupan pendidikan kewarganegaraan. Jika PMP lebih berfokus pada aspek moral dan pengamalan Pancasila, maka PPKn mulai memasukkan berbagai materi yang berkaitan dengan kehidupan bernegara dan

kewarganegaraan (Winataputra, 2015). Materi yang diajarkan dalam PPKn mencakup:

- a. Nilai-nilai Pancasila.
- b. Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Sistem pemerintahan Indonesia.
- d. Hak dan kewajiban warga negara.
- e. Demokrasi Pancasila.
- f. Wawasan Nusantara.
- g. Ketahanan Nasional.
- h. Hak Asasi Manusia.
- i. Organisasi negara dan lembaga pemerintahan.

5. Karakteristik Pembelajaran PPKn pada Masa Orde Baru

Secara umum, pendidikan kewarganegaraan pada masa Orde Baru memiliki beberapa karakteristik utama.

a. Pertama, berorientasi pada penanaman ideologi negara.

Pancasila menjadi fokus utama pembelajaran. Seluruh materi dan aktivitas pembelajaran diarahkan untuk memperkuat pemahaman peserta didik terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara.

b. Kedua, menekankan stabilitas dan persatuan nasional.

Pendidikan kewarganegaraan dirancang untuk membentuk warga negara yang mendukung stabilitas

politik, persatuan bangsa, dan pembangunan nasional.

c. Ketiga, berpusat pada guru (teacher centered).

Proses pembelajaran umumnya dilakukan melalui metode ceramah dan penyampaian informasi secara satu arah. Guru berperan sebagai sumber utama pengetahuan, sedangkan peserta didik lebih banyak berperan sebagai penerima informasi.

d. Keempat, menekankan kepatuhan terhadap norma dan aturan.

Peserta didik didorong untuk mematuhi hukum, menghormati pemerintah, dan menjalankan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. Kurikulum Pembelajaran PPKn Masa Reformasi

Era Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 menjadi titik balik penting dalam perkembangan sistem pendidikan nasional Indonesia. Reformasi tidak hanya membawa perubahan dalam bidang politik, ekonomi, dan hukum, tetapi juga memberikan dampak yang signifikan terhadap arah dan tujuan pendidikan nasional. Perubahan tersebut didorong oleh tuntutan masyarakat terhadap kehidupan yang lebih demokratis, transparan, menghargai

hak asasi manusia, serta memberikan ruang partisipasi yang lebih luas bagi warga negara dalam proses pembangunan nasional.

Dalam konteks pendidikan, Reformasi mendorong terjadinya perubahan paradigma dari pendidikan yang bersifat sentralistik dan indoktrinatif menuju pendidikan yang demokratis, partisipatif, dan berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik. Pendidikan kewarganegaraan menjadi salah satu bidang yang mengalami transformasi cukup signifikan karena dipandang memiliki peran strategis dalam membentuk warga negara yang mampu hidup dalam sistem demokrasi yang berkembang di Indonesia (Winataputra, 2015).

Jika pada masa Orde Baru pendidikan kewarganegaraan lebih menekankan pada penanaman nilai-nilai yang bersifat normatif dan kepatuhan terhadap negara, maka pada era Reformasi pendidikan kewarganegaraan diarahkan untuk membentuk warga negara yang kritis, aktif, demokratis, dan memiliki kesadaran terhadap hak serta kewajibannya sebagai bagian dari masyarakat demokratis. Perubahan ini sejalan dengan perkembangan global yang menempatkan demokrasi, hak asasi manusia, dan partisipasi warga negara sebagai unsur penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

1. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan

Perubahan politik yang terjadi pasca-Reformasi membawa paradigma baru dalam pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan tidak lagi dipandang sebagai alat legitimasi kekuasaan, tetapi sebagai sarana pemberdayaan warga negara agar mampu berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan demokratis.

Paradigma baru pendidikan kewarganegaraan menempatkan peserta didik sebagai subjek pembelajaran yang aktif. Peserta didik didorong untuk berpikir kritis terhadap berbagai persoalan sosial, politik, hukum, dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Pembelajaran tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi, tetapi juga pada pengembangan kemampuan analisis, pengambilan keputusan, pemecahan masalah, serta partisipasi dalam kehidupan publik.

Menurut Winataputra (2015), pendidikan kewarganegaraan pada era Reformasi diarahkan untuk membangun *democratic citizenship*, yaitu warga negara yang memahami prinsip-prinsip demokrasi, menghormati hak asasi manusia, menjunjung supremasi hukum, serta mampu berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan masyarakat dan negara.

Paradigma ini menunjukkan bahwa tujuan utama pendidikan kewarganegaraan bukan hanya menciptakan warga negara yang patuh terhadap aturan, tetapi juga warga negara yang memiliki kemampuan untuk mengkritisi kebijakan publik, memperjuangkan keadilan sosial, dan berkontribusi dalam pembangunan demokrasi.

2. Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) Tahun 2004

Salah satu perubahan penting pada era Reformasi adalah diterapkannya **Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) Tahun 2004**. Kurikulum ini menandai pergeseran orientasi pendidikan dari pendekatan berbasis materi menuju pendekatan berbasis kompetensi.

Dalam KBK, Pendidikan Kewarganegaraan tidak lagi hanya berfokus pada penyampaian pengetahuan tentang negara dan pemerintahan, tetapi juga menekankan pada pengembangan kompetensi peserta didik secara menyeluruh. Kompetensi yang dikembangkan mencakup aspek pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), dan sikap (*attitudes*) yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat dan

bernegara. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada KBK diarahkan untuk:

1. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan rasional.
2. Menumbuhkan kesadaran terhadap hak dan kewajiban warga negara.
3. Membentuk sikap demokratis dan toleran.
4. Mengembangkan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.
5. Menanamkan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
6. Membentuk karakter yang bertanggung jawab dan berintegritas.

Menurut Sapriya (2017), pendekatan berbasis kompetensi memberikan kesempatan yang lebih luas kepada peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran melalui diskusi, studi kasus, simulasi, pemecahan masalah, dan berbagai aktivitas yang mendorong keterlibatan langsung peserta didik.

3. Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Tahun 2006

Perkembangan berikutnya terjadi dengan diterapkannya **Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Tahun 2006**. Kurikulum ini merupakan

penyempurnaan dari Kurikulum Berbasis Kompetensi dengan memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik.

KTSP memberikan fleksibilitas kepada guru untuk mengembangkan materi, metode, dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah dan masyarakat setempat. Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan, guru memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mengaitkan materi pembelajaran dengan berbagai persoalan nyata yang terjadi di lingkungan peserta didik. Karakteristik pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada KTSP meliputi:

- a. Berpusat pada peserta didik (*student centered learning*).
- b. Mengembangkan pembelajaran kontekstual.
- c. Mendorong partisipasi aktif peserta didik.
- d. Mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran.
- e. Mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi.

Melalui KTSP, pendidikan kewarganegaraan mulai lebih responsif terhadap perkembangan masyarakat dan tantangan global. Peserta didik tidak hanya mempelajari konsep-konsep kewarganegaraan

secara teoritis, tetapi juga dilatih untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

4. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2013

Transformasi pendidikan kewarganegaraan semakin terlihat dengan diberlakukannya **Kurikulum 2013**. Dalam kurikulum ini, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kembali menggunakan nama **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)** untuk menegaskan pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kurikulum 2013 menempatkan pendidikan karakter sebagai salah satu fokus utama pendidikan nasional. Oleh karena itu, pembelajaran PPKn tidak hanya diarahkan pada penguasaan konsep-konsep kewarganegaraan, tetapi juga pada pembentukan karakter peserta didik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran PPKn dalam Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan tiga kompetensi utama kewarganegaraan, yaitu:

a. Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic Knowledge*)

Pengetahuan kewarganegaraan mencakup pemahaman mengenai Pancasila, Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, demokrasi, sistem politik, hukum, serta berbagai isu kewarganegaraan yang berkembang dalam masyarakat. Peserta didik diharapkan mampu memahami konsep-konsep tersebut sebagai dasar dalam menjalankan perannya sebagai warga negara yang baik.

b. Keterampilan Kewarganegaraan (*Civic Skills*)

Keterampilan kewarganegaraan mencakup kemampuan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah sosial, kemampuan berkomunikasi, kemampuan bekerja sama, serta kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan demokratis. Melalui berbagai model pembelajaran aktif seperti *Problem Based Learning*, *Project Based Learning*, dan *Discovery Learning*, peserta didik didorong untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat modern.

c. Karakter Kewarganegaraan (*Civic Dispositions*)

Karakter kewarganegaraan mencakup sikap dan nilai yang mencerminkan warga negara yang baik, seperti tanggung jawab, toleransi, kejujuran, disiplin, gotong royong, cinta tanah air, serta komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi. Aspek ini menjadi fokus utama

dalam pembelajaran PPKn karena keberhasilan pendidikan kewarganegaraan tidak hanya diukur dari tingkat pengetahuan peserta didik, tetapi juga dari perilaku dan karakter yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari.

5. Integrasi Pendidikan Karakter pada Era Reformasi

Salah satu ciri penting pendidikan kewarganegaraan pada era Reformasi adalah semakin kuatnya integrasi pendidikan karakter ke dalam proses pembelajaran. Pemerintah menyadari bahwa berbagai permasalahan bangsa seperti korupsi, intoleransi, kekerasan, dan menurunnya rasa nasionalisme memerlukan solusi melalui pendidikan karakter yang berkelanjutan. PPKn menjadi mata pelajaran yang memiliki peran sentral dalam penguatan pendidikan karakter karena secara langsung mengajarkan nilai-nilai Pancasila, demokrasi, hak asasi manusia, tanggung jawab sosial, dan kehidupan berbangsa yang harmonis.

Melalui pendidikan karakter, peserta didik diharapkan mampu menjadi individu yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas moral, kepedulian sosial, dan komitmen terhadap kepentingan bangsa dan negara.

6. Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi

Era Reformasi juga bertepatan dengan semakin kuatnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi. Kondisi ini menghadirkan berbagai peluang sekaligus tantangan bagi kehidupan kewarganegaraan. Peserta didik saat ini hidup dalam masyarakat digital yang memungkinkan mereka mengakses informasi dari berbagai belahan dunia secara cepat dan mudah. Namun, kondisi tersebut juga menimbulkan risiko berupa penyebaran hoaks, ujaran kebencian, intoleransi, radikalisme, serta berbagai bentuk penyimpangan di ruang digital.

Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan pada era Reformasi mulai mengembangkan konsep **kewarganegaraan digital (digital citizenship)**. Peserta didik dibekali kemampuan untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, menghormati hak orang lain dalam ruang digital, serta mampu menyaring informasi secara kritis.

7. Karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan Era Reformasi

Secara umum, pendidikan kewarganegaraan pada era Reformasi memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Berorientasi pada pengembangan demokrasi dan hak asasi manusia.
- b. Menempatkan peserta didik sebagai subjek pembelajaran.
- c. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan reflektif.
- d. Mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat.
- e. Mengintegrasikan pendidikan karakter dan nilai-nilai Pancasila.
- f. Mengembangkan kompetensi kewarganegaraan secara utuh.
- g. Responsif terhadap perkembangan global dan teknologi digital.
- h. Menekankan pembelajaran yang kontekstual dan berbasis pengalaman.

F. Rangkuman

Pendidikan Pancasila merupakan proses pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik agar dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan Pancasila tidak hanya menekankan pada pemahaman konsep Pancasila secara teoritis, tetapi juga pada proses internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendidikan Pancasila diharapkan terbentuk warga negara yang memiliki sikap nasionalisme, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta mampu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial.

Perkembangan kurikulum pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Indonesia tidak terlepas dari dinamika sosial, politik, dan perkembangan sistem pendidikan nasional. Pada masa Orde Lama, pendidikan kewarganegaraan masih dalam tahap awal perkembangan dan lebih menekankan pada pembentukan semangat nasionalisme serta kesadaran kebangsaan. Mata pelajaran yang diajarkan pada masa ini antara lain Civics dan Pendidikan Kewargaan Negara yang bertujuan untuk

memperkenalkan sistem kenegaraan serta hak dan kewajiban warga negara kepada peserta didik.

Pada masa Orde Baru, pendidikan kewarganegaraan mengalami perubahan dengan penekanan yang lebih kuat pada penanaman nilai-nilai Pancasila. Pada periode ini muncul mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku peserta didik agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam perkembangan selanjutnya, mata pelajaran tersebut berubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang mencakup materi yang lebih luas mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara.

Memasuki era Reformasi, pembelajaran PPKn mengalami pembaruan yang menyesuaikan dengan perkembangan demokrasi dan tuntutan masyarakat yang semakin terbuka. Kurikulum pendidikan kewarganegaraan mulai menekankan pada pengembangan kompetensi kewarganegaraan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan karakter kewarganegaraan. Pembelajaran PPKn pada masa ini diarahkan untuk membentuk peserta didik menjadi warga negara yang demokratis, kritis, serta mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dengan demikian, perkembangan kurikulum pembelajaran PPKn di Indonesia menunjukkan adanya perubahan yang mengikuti dinamika sosial dan politik bangsa. Perubahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan kewarganegaraan agar mampu membentuk generasi yang memiliki karakter kebangsaan, kesadaran demokrasi, serta tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia.

BAB 3

KARAKTERISTIK PESERTA DIDIK DALAM PERENCANAAN PEMBELAJARAN

A. Pengertian Karakteristik Peserta Didik

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Perencanaan Pembelajaran PKn yaitu Mahasiswa mampu mengidentifikasi karakteristik peserta didik dalam menyusun rencana pembelajaran yang tepat. Salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan proses pembelajaran adalah pemahaman guru terhadap karakteristik peserta didik. Setiap peserta didik memiliki latar belakang, kemampuan, minat, gaya belajar, serta perkembangan psikologis yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut menuntut seorang guru untuk mampu merancang pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan bermakna.

Dalam konteks pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), pemahaman terhadap karakteristik peserta didik menjadi sangat penting karena pembelajaran PPKn tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan sikap, nilai, dan karakter kewarganegaraan. Oleh karena itu, guru perlu mempertimbangkan berbagai aspek perkembangan peserta didik seperti perkembangan kognitif,

afektif, sosial, serta moral dalam merancang kegiatan pembelajaran yang mampu menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara.



Gambar 3. Karakteristik Peserta didik

Karakteristik peserta didik juga berkaitan dengan tahap perkembangan usia, lingkungan sosial, serta pengalaman belajar yang dimiliki oleh peserta didik. Peserta didik pada jenjang pendidikan yang berbeda memiliki kemampuan berpikir, cara memahami informasi, serta kebutuhan belajar yang berbeda pula. Dengan memahami karakteristik tersebut, guru dapat menentukan strategi pembelajaran, metode, media, serta bentuk evaluasi yang tepat sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal.

Selain itu, pemahaman terhadap karakteristik peserta didik juga menjadi dasar dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (student centered learning). Pendekatan ini menempatkan peserta didik sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat berperan aktif dalam membangun pengetahuan, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, serta menumbuhkan sikap demokratis yang merupakan bagian penting dari kompetensi kewarganegaraan.

Bab ini membahas mengenai berbagai karakteristik peserta didik yang perlu dipahami oleh guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran PPKn. Pembahasan meliputi konsep dasar karakteristik peserta didik, aspek-aspek perkembangan peserta didik, serta implikasinya dalam perencanaan pembelajaran. Dengan mempelajari materi pada bab ini, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi karakteristik peserta didik dan menggunakannya sebagai dasar dalam merancang pembelajaran PPKn yang efektif, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

B. Karakteristik Peserta Didik

Peserta didik merupakan individu yang sedang berada dalam proses perkembangan baik secara fisik, intelektual, emosional, sosial, maupun moral. Setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda yang

dipengaruhi oleh faktor usia, lingkungan, pengalaman belajar, latar belakang keluarga, serta kondisi sosial budaya. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran seorang guru perlu memahami karakteristik peserta didik agar dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka (Uno, 2016).

Karakteristik peserta didik dapat diartikan sebagai keseluruhan pola perilaku, kemampuan, potensi, serta kondisi yang dimiliki oleh peserta didik yang memengaruhi proses dan hasil belajar. Karakteristik tersebut meliputi kemampuan awal, minat belajar, motivasi belajar, gaya belajar, serta latar belakang sosial dan budaya peserta didik (Sanjaya, 2017).

Dalam konteks pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), pemahaman terhadap karakteristik peserta didik sangat penting karena pembelajaran PPKn tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap, nilai, serta karakter kewarganegaraan. Oleh karena itu, guru perlu memahami kondisi peserta didik agar pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan mampu menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari (Winarno, 2013).

Secara umum, karakteristik peserta didik dapat dilihat dari beberapa aspek perkembangan, yaitu perkembangan kognitif, perkembangan afektif, perkem-

bangun sosial, dan perkembangan moral. Perkembangan kognitif berkaitan dengan kemampuan berpikir peserta didik dalam memahami konsep-konsep pembelajaran. Perkembangan afektif berkaitan dengan sikap, minat, serta nilai yang dimiliki peserta didik. Sementara itu, perkembangan sosial berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya (Santrock, 2011).

Pemahaman terhadap karakteristik peserta didik akan membantu guru dalam menentukan metode pembelajaran, strategi pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, serta teknik evaluasi yang tepat sehingga proses pembelajaran dapat berjalan secara optimal.

C. Analisis Kebutuhan Belajar

Analisis kebutuhan belajar merupakan proses mengidentifikasi kebutuhan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kesenjangan antara kemampuan yang dimiliki peserta didik dengan kompetensi yang diharapkan dalam proses pembelajaran. Dengan melakukan analisis kebutuhan belajar, guru dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan relevan (Dick & Carey, 2015).

Dalam proses perencanaan pembelajaran, analisis kebutuhan belajar menjadi salah satu langkah penting yang

harus dilakukan oleh guru. Melalui analisis kebutuhan belajar, guru dapat mengetahui kemampuan awal peserta didik, kesulitan belajar yang dihadapi, serta potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, serta media pembelajaran yang akan digunakan (Majid, 2014).

Analisis kebutuhan belajar dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti observasi terhadap kegiatan belajar peserta didik, wawancara dengan peserta didik, pemberian angket atau kuesioner, serta melalui hasil evaluasi pembelajaran sebelumnya. Melalui berbagai teknik tersebut, guru dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kebutuhan belajar peserta didik (Sanjaya, 2017).

Dalam pembelajaran PPKn, analisis kebutuhan belajar juga berkaitan dengan pemahaman terhadap kondisi sosial peserta didik serta lingkungan masyarakat tempat mereka tinggal. Hal ini penting karena pembelajaran PPKn memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan sosial dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, pembelajaran PPKn dapat dirancang secara kontekstual sehingga peserta didik mampu memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari (Winarno, 2013).

D. Gaya Belajar Peserta Didik

Gaya belajar merupakan cara yang digunakan oleh peserta didik dalam menerima, memahami, serta mengolah informasi selama proses pembelajaran berlangsung. Setiap peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda-beda sehingga guru perlu memahami gaya belajar peserta didik agar dapat memilih metode pembelajaran yang tepat (DePorter & Hernacki, 2015).

Secara umum, gaya belajar peserta didik dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Peserta didik dengan gaya belajar visual cenderung lebih mudah memahami informasi melalui gambar, diagram, grafik, atau media visual lainnya. Peserta didik dengan gaya belajar auditori lebih mudah memahami informasi melalui penjelasan lisan, diskusi, atau kegiatan mendengarkan. Sementara itu, peserta didik dengan gaya belajar kinestetik lebih mudah memahami informasi melalui kegiatan praktik, simulasi, atau aktivitas yang melibatkan gerakan fisik (Uno, 2016).

Pemahaman terhadap gaya belajar peserta didik sangat penting dalam proses perencanaan pembelajaran. Guru perlu menggunakan berbagai variasi metode dan media pembelajaran agar dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar peserta didik. Dengan demikian, setiap peserta

didik memiliki kesempatan yang sama untuk memahami materi pembelajaran secara optimal.

Dalam pembelajaran PPKn, penggunaan berbagai metode pembelajaran seperti diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, serta penggunaan media visual dapat membantu peserta didik dalam memahami materi pembelajaran secara lebih mendalam. Selain itu, variasi metode pembelajaran juga dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik sehingga mereka lebih aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran (Sanjaya, 2017).

Dengan memahami karakteristik peserta didik, melakukan analisis kebutuhan belajar, serta mengenali gaya belajar peserta didik, guru dapat merancang pembelajaran yang lebih efektif, menarik, serta sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Hal ini akan mendukung tercapainya tujuan pembelajaran serta meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelas.

E. Rangkuman

Peserta didik merupakan individu yang memiliki berbagai karakteristik yang berbeda-beda, baik dari segi kemampuan intelektual, minat belajar, motivasi, latar belakang sosial, maupun pengalaman belajar. Perbedaan karakteristik tersebut perlu dipahami oleh guru karena akan memengaruhi proses dan hasil pembelajaran. Pemahaman terhadap karakteristik peserta didik menjadi dasar penting

dalam merancang perencanaan pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Karakteristik peserta didik mencakup berbagai aspek perkembangan, antara lain perkembangan kognitif, afektif, sosial, dan moral. Perkembangan kognitif berkaitan dengan kemampuan berpikir peserta didik dalam memahami konsep pembelajaran, sedangkan perkembangan afektif berkaitan dengan sikap, minat, dan nilai yang dimiliki oleh peserta didik. Sementara itu, perkembangan sosial berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Dengan memahami aspek-aspek perkembangan tersebut, guru dapat menyesuaikan strategi pembelajaran yang digunakan di kelas.

Selain memahami karakteristik peserta didik, guru juga perlu melakukan analisis kebutuhan belajar. Analisis kebutuhan belajar merupakan proses untuk mengidentifikasi kemampuan awal, kesulitan belajar, serta potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Melalui analisis kebutuhan belajar, guru dapat mengetahui kesenjangan antara kemampuan yang dimiliki peserta didik dengan kompetensi yang diharapkan dalam pembelajaran. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, serta media pembelajaran yang akan digunakan.

Dalam proses pembelajaran, setiap peserta didik juga memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Secara umum, gaya belajar peserta didik dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Peserta didik dengan gaya belajar visual lebih mudah memahami informasi melalui media gambar atau tulisan, peserta didik dengan gaya belajar auditori lebih mudah memahami melalui penjelasan lisan, sedangkan peserta didik dengan gaya belajar kinestetik lebih mudah memahami melalui aktivitas praktik atau pengalaman langsung.

Pemahaman terhadap gaya belajar peserta didik akan membantu guru dalam memilih metode dan strategi pembelajaran yang bervariasi sehingga proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan efektif. Dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, analisis kebutuhan belajar, serta gaya belajar peserta didik, guru dapat merancang pembelajaran yang lebih tepat, kontekstual, dan mampu meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Hal ini sangat penting terutama dalam pembelajaran PPKn yang tidak hanya menekankan pada aspek pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan sikap dan karakter kewarganegaraan.

BAB 4

PEMANFAATAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN DALAM PERENCANAAN PEMBELAJARAN PPKn

A. Teknologi Pendidikan

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Perencanaan Pembelajaran PKn yaitu Mahasiswa mampu memanfaatkan teknologi pendidikan dalam merancang perencanaan pembelajaran yang inovatif. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era digital saat ini membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Teknologi tidak hanya digunakan sebagai alat bantu dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran di sekolah maupun di perguruan tinggi. Pemanfaatan teknologi pendidikan memungkinkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif, menarik, dan interaktif sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran.

Dalam kegiatan pembelajaran, teknologi pendidikan dapat digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan materi pembelajaran, mengembangkan media pembelajaran, serta mendukung proses komunikasi antara

guru dan peserta didik. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperoleh informasi secara lebih luas serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Oleh karena itu, guru dituntut untuk memiliki kemampuan dalam memanfaatkan teknologi pendidikan sebagai bagian dari perencanaan pembelajaran.



Gambar 4. Pemanfaatan Teknologi Pendidikan

Dalam konteks pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), pemanfaatan teknologi pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung proses pembelajaran yang inovatif dan kontekstual. Materi PPKn yang berkaitan dengan nilai-nilai

Pancasila, demokrasi, hak asasi manusia, serta kehidupan berbangsa dan bernegara dapat disampaikan secara lebih menarik melalui berbagai media berbasis teknologi seperti video pembelajaran, presentasi interaktif, platform pembelajaran daring, serta berbagai sumber belajar digital lainnya.

Selain itu, pemanfaatan teknologi pendidikan juga dapat membantu guru dalam merancang pembelajaran yang lebih variatif dan berpusat pada peserta didik. Dengan menggunakan berbagai media dan aplikasi pembelajaran, peserta didik dapat lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran serta lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Hal ini sejalan dengan tuntutan pembelajaran abad ke-21 yang menekankan pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi.

Bab ini membahas mengenai konsep teknologi pendidikan serta pemanfaatannya dalam perencanaan pembelajaran PPKn. Pembahasan meliputi pengertian teknologi pendidikan, jenis-jenis teknologi yang dapat digunakan dalam pembelajaran, serta peran teknologi dalam mendukung proses pembelajaran yang inovatif. Melalui pembahasan pada bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami pentingnya pemanfaatan teknologi pendidikan serta mampu mengintegrasikannya dalam perencanaan pembelajaran PPKn secara efektif dan kreatif.

B. Konsep Teknologi Pendidikan

Teknologi pendidikan merupakan suatu pendekatan sistematis yang digunakan untuk memfasilitasi proses pembelajaran agar dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Teknologi pendidikan tidak hanya berkaitan dengan penggunaan perangkat teknologi seperti komputer, internet, atau perangkat digital lainnya, tetapi juga mencakup proses perancangan, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan evaluasi sumber belajar yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran (Januszewski & Molenda, 2008).

Menurut definisi yang dikemukakan oleh Association for Educational Communications and Technology (AECT), teknologi pendidikan adalah studi dan praktik etis dalam memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja melalui penciptaan, penggunaan, serta pengelolaan proses dan sumber daya teknologi yang tepat (Januszewski & Molenda, 2008). Definisi tersebut menunjukkan bahwa teknologi pendidikan tidak semata-mata berorientasi pada penggunaan perangkat keras maupun perangkat lunak, tetapi lebih menekankan pada bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran secara efektif.

Dalam perkembangannya, teknologi pendidikan telah

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan modern. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara guru mengajar, cara peserta didik belajar, serta cara sekolah mengelola proses pendidikan. Pembelajaran yang sebelumnya berpusat pada guru (*teacher centered learning*) secara bertahap bergeser menuju pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (*student centered learning*), di mana teknologi berfungsi sebagai sarana yang memungkinkan peserta didik lebih aktif dalam membangun pengetahuan dan keterampilannya.

Menurut Smaldino, Lowther, dan Russell (2014), teknologi pendidikan memberikan peluang bagi peserta didik untuk mengakses berbagai sumber belajar yang beragam, baik dalam bentuk teks, gambar, audio, video, maupun simulasi interaktif. Kemudahan akses terhadap informasi tersebut memungkinkan peserta didik untuk belajar secara mandiri, kolaboratif, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik masing-masing individu.

1. Hakikat Teknologi Pendidikan

Hakikat teknologi pendidikan terletak pada upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran melalui pemanfaatan berbagai sumber belajar dan teknologi yang tersedia. Teknologi

pendidikan bukan sekadar penggunaan alat-alat modern dalam pembelajaran, tetapi merupakan suatu sistem yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan evaluasi pembelajaran secara menyeluruh.

Dalam perspektif pendidikan modern, teknologi pendidikan memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu:

a. **Berorientasi pada tujuan pembelajaran**

Pemanfaatan teknologi harus diarahkan untuk membantu pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Teknologi bukan tujuan utama, melainkan sarana untuk mencapai tujuan pendidikan.

b. **Menggunakan pendekatan sistem**

Teknologi pendidikan memandang pembelajaran sebagai suatu sistem yang terdiri atas berbagai komponen yang saling berkaitan, seperti tujuan, materi, metode, media, peserta didik, guru, dan evaluasi.

c. **Berpusat pada peserta didik**

Teknologi pendidikan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berperan aktif dalam proses belajar melalui berbagai aktivitas yang menuntut keterlibatan langsung.

d. **Memanfaatkan berbagai sumber belajar**

Teknologi pendidikan tidak hanya menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, tetapi juga memanfaatkan berbagai sumber lain seperti internet, multimedia, lingkungan, narasumber, dan media digital.

e. **Berorientasi pada efektivitas dan efisiensi**

Penggunaan teknologi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus mengoptimalkan penggunaan waktu, tenaga, dan sumber daya yang tersedia.

2. Perkembangan Teknologi Pendidikan di Era Digital

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Kehadiran internet, perangkat seluler, media sosial, kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), serta berbagai platform pembelajaran daring telah membuka peluang baru dalam penyelenggaraan pembelajaran.

Pada era digital, proses pembelajaran tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Peserta didik dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja melalui berbagai platform digital. Pembelajaran juga dapat dilakukan secara sinkron (*synchronous learning*) maupun asinkron (*asynchronous*

learning), sehingga memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi peserta didik.

Selain itu, teknologi digital memungkinkan terjadinya pembelajaran yang lebih personal (*personalized learning*). Guru dapat menyesuaikan materi, metode, dan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Hal ini sejalan dengan tuntutan pendidikan abad ke-21 yang menekankan pentingnya pengembangan kreativitas, kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi.

3. Fungsi Teknologi Pendidikan dalam Pembelajaran PPKn

Dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), teknologi pendidikan memiliki berbagai fungsi yang sangat penting. Fungsi-fungsi tersebut antara lain:

a. Sebagai Sumber Belajar

Teknologi memungkinkan peserta didik memperoleh berbagai informasi yang berkaitan dengan materi PPKn melalui internet, perpustakaan digital, jurnal elektronik, video pembelajaran, maupun berbagai sumber belajar lainnya. Peserta didik dapat mengakses dokumen konstitusi, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan, berita

aktual, maupun berbagai referensi akademik yang relevan dengan materi pembelajaran.

b. Sebagai Media Pembelajaran

Teknologi pendidikan dapat digunakan sebagai media untuk menyampaikan materi pembelajaran secara lebih menarik dan mudah dipahami. Guru dapat memanfaatkan video, animasi, presentasi interaktif, infografis, podcast, maupun aplikasi pembelajaran digital untuk menjelaskan konsep-konsep kewarganegaraan yang kompleks. Misalnya, materi mengenai sistem pemerintahan Indonesia dapat dijelaskan melalui video animasi yang menggambarkan hubungan antar lembaga negara sehingga lebih mudah dipahami oleh peserta didik.

c. Sebagai Sarana Interaksi dan Kolaborasi

Teknologi memungkinkan peserta didik berinteraksi dan berkolaborasi dengan guru maupun teman sekelas melalui berbagai platform digital seperti Google Classroom, Microsoft Teams, Moodle, Zoom, atau Learning Management System (LMS) lainnya. Melalui teknologi tersebut, peserta didik dapat berdiskusi mengenai isu-isu kewarganegaraan, mengerjakan proyek kelompok, maupun bertukar gagasan secara daring.

d. Sebagai Sarana Evaluasi Pembelajaran

Teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi pembelajaran secara lebih efektif. Guru dapat menggunakan berbagai aplikasi seperti Google Forms, Quizizz, Kahoot!, atau platform evaluasi lainnya untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi PPKn.

4. Pemanfaatan Teknologi dalam Pembelajaran PPKn

Pembelajaran PPKn memiliki karakteristik yang menekankan pada pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan karakter kewarganegaraan. Oleh karena itu, penggunaan teknologi dalam pembelajaran PPKn harus diarahkan untuk mendukung ketiga aspek tersebut. Beberapa bentuk pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran PPKn antara lain:

a. Video Pembelajaran

Video dapat digunakan untuk menjelaskan materi mengenai sejarah bangsa, proses demokrasi, hak asasi manusia, maupun implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

b. Infografis Digital

Infografis membantu peserta didik memahami informasi yang kompleks secara visual dan lebih mudah dipahami. Materi seperti struktur

pemerintahan, sistem hukum, maupun proses pemilu dapat disajikan dalam bentuk infografis.

c. Simulasi dan Virtual Learning

Guru dapat menggunakan simulasi sidang parlemen, simulasi pemilu, maupun simulasi musyawarah untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih nyata kepada peserta didik.

d. Pembelajaran Berbasis Proyek Digital

Peserta didik dapat membuat video kampanye toleransi, poster digital tentang hak asasi manusia, podcast kebangsaan, atau proyek kewarganegaraan lainnya yang memanfaatkan teknologi digital.

e. Pemanfaatan Media Sosial Edukatif

Media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran kewarganegaraan dengan mengajak peserta didik menganalisis isu-isu sosial, politik, dan kebangsaan yang sedang berkembang secara kritis dan bertanggung jawab.

5. Tantangan Pemanfaatan Teknologi dalam Pembelajaran PPKn

Meskipun memiliki banyak manfaat, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran PPKn juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kesenjangan akses teknologi yang masih terjadi di berbagai daerah.

Tidak semua peserta didik memiliki perangkat dan akses internet yang memadai untuk mengikuti pembelajaran berbasis teknologi.

Selain itu, perkembangan teknologi juga membawa berbagai risiko seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, radikalisme digital, serta penyalahgunaan media sosial. Oleh karena itu, guru PPKn memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan literasi digital dan etika digital peserta didik agar mampu menggunakan teknologi secara bijaksana. Guru juga perlu meningkatkan kompetensi digital agar mampu memilih, mengembangkan, dan memanfaatkan teknologi pembelajaran secara efektif sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.

6. Implikasi Teknologi Pendidikan terhadap Perencanaan Pembelajaran PPKn

Pemanfaatan teknologi pendidikan harus menjadi bagian integral dari perencanaan pembelajaran PPKn. Dalam menyusun perencanaan pembelajaran, guru perlu mempertimbangkan jenis teknologi yang akan digunakan, kesesuaian teknologi dengan karakteristik peserta didik, ketersediaan sarana dan prasarana, serta relevansinya dengan tujuan pembelajaran.

Perencanaan pembelajaran berbasis teknologi harus mampu menciptakan pengalaman belajar yang aktif, kreatif, kolaboratif, dan bermakna. Dengan

demikian, teknologi tidak hanya menjadi alat bantu pembelajaran, tetapi juga menjadi sarana untuk mengembangkan kompetensi kewarganegaraan abad ke-21 yang meliputi kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, kreativitas, literasi digital, serta tanggung jawab sebagai warga negara digital.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa teknologi pendidikan merupakan komponen penting dalam pembelajaran PPKn modern. Melalui pemanfaatan teknologi yang tepat, guru dapat menciptakan pembelajaran yang lebih efektif, menarik, kontekstual, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik di era digital. Teknologi pendidikan juga berperan dalam mendukung pengembangan pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, dan karakter kewarganegaraan sehingga tujuan pembelajaran PPKn dapat tercapai secara optimal.

C. Jenis-Jenis Teknologi Pendidikan

Teknologi pendidikan dalam proses pembelajaran dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsi, karakteristik, dan bentuk penggunaannya. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah menghadirkan berbagai alternatif media dan sumber belajar yang dapat

dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Secara umum, teknologi pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbasis komputer, dan teknologi berbasis jaringan atau internet (Seels & Richey, 1994).

Klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa teknologi pendidikan tidak hanya terbatas pada penggunaan perangkat digital modern, tetapi juga mencakup berbagai media dan sumber belajar yang telah lama digunakan dalam dunia pendidikan. Setiap jenis teknologi memiliki karakteristik, kelebihan, dan keterbatasan masing-masing sehingga penggunaannya perlu disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, materi yang diajarkan, serta kondisi lingkungan belajar.

Dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), berbagai jenis teknologi pendidikan dapat dimanfaatkan untuk membantu peserta didik memahami konsep-konsep kewarganegaraan yang bersifat abstrak, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan secara lebih efektif dan menarik.

1. Teknologi Cetak (*Print Technology*)

Teknologi cetak merupakan bentuk teknologi pendidikan yang paling awal dan hingga saat ini masih

banyak digunakan dalam dunia pendidikan. Teknologi cetak memanfaatkan media berbasis tulisan yang diproduksi melalui proses percetakan atau reproduksi teks sebagai sarana penyampaian informasi dan pengetahuan.

Menurut Smaldino, Lowther, dan Russell (2014), media cetak mencakup berbagai bahan ajar seperti:

- a. Buku teks.
- b. Modul pembelajaran.
- c. Handout.
- d. Lembar kerja peserta didik (LKPD).
- e. Buku panduan.
- f. Jurnal dan artikel ilmiah.
- g. Majalah pendidikan.
- h. Brosur dan leaflet edukatif.

Teknologi cetak memiliki beberapa keunggulan, antara lain mudah digunakan, tidak memerlukan perangkat khusus, relatif murah, mudah disimpan, serta dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta didik. Selain itu, media cetak memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan dan kemampuan masing-masing.

Dalam pembelajaran PPKn, teknologi cetak dapat digunakan untuk menyajikan berbagai materi seperti

nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, demokrasi, sistem pemerintahan, maupun berbagai isu kewarganegaraan lainnya. Guru juga dapat mengembangkan modul pembelajaran yang memuat studi kasus, tugas reflektif, dan latihan analisis untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik.

Meskipun demikian, teknologi cetak memiliki keterbatasan karena bersifat statis dan kurang mampu menampilkan informasi secara visual maupun interaktif. Oleh karena itu, penggunaan teknologi cetak sering kali perlu dipadukan dengan jenis teknologi lainnya agar pembelajaran menjadi lebih menarik.

2. Teknologi Audiovisual (*Audiovisual Technology*)

Teknologi audiovisual merupakan teknologi pembelajaran yang mengombinasikan unsur visual (gambar) dan audio (suara) dalam penyampaian informasi kepada peserta didik. Teknologi ini dirancang untuk merangsang lebih dari satu indera sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dibandingkan penggunaan media yang hanya mengandalkan teks atau suara saja.

Menurut Arsyad (2017), teknologi audiovisual dapat membantu peserta didik memahami materi

pembelajaran secara lebih konkret karena informasi disajikan melalui kombinasi gambar bergerak, suara, musik, narasi, dan efek visual lainnya. Contoh teknologi audiovisual dalam pembelajaran meliputi:

- a. Video pembelajaran.
- b. Film dokumenter pendidikan.
- c. Film sejarah.
- d. Televisi edukasi.
- e. Podcast video.
- f. Animasi pendidikan.
- g. Presentasi multimedia.
- h. Rekaman wawancara tokoh.
- i. Siaran berita edukatif.

Penggunaan teknologi audiovisual sangat relevan dalam pembelajaran PPKn karena banyak materi yang berkaitan dengan peristiwa sejarah, kehidupan demokrasi, sistem pemerintahan, serta dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai contoh, guru dapat memanfaatkan video dokumenter tentang proses perumusan Pancasila, film perjuangan kemerdekaan Indonesia, rekaman sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau video mengenai pelaksanaan pemilu sebagai media pembelajaran. Melalui media tersebut, peserta didik dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih nyata dan kontekstual.

Keunggulan teknologi audiovisual antara lain:

- a. Meningkatkan perhatian dan motivasi belajar peserta didik.
- b. Mempermudah pemahaman konsep yang abstrak.
- c. Menyajikan informasi secara lebih konkret.
- d. Meningkatkan daya ingat peserta didik.
- e. Memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik.

Namun demikian, penggunaan teknologi audiovisual memerlukan peralatan tertentu seperti proyektor, komputer, speaker, atau perangkat pemutar video yang mungkin tidak selalu tersedia di setiap sekolah.

3. Teknologi Berbasis Komputer (*Computer-Based Technology*)

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pemanfaatan komputer sebagai salah satu media pembelajaran yang sangat penting. Teknologi berbasis komputer merupakan teknologi pendidikan yang menggunakan perangkat komputer untuk menyampaikan materi pembelajaran, mengelola aktivitas belajar, maupun melakukan evaluasi pembelajaran.

Menurut Smaldino et al. (2014), teknologi berbasis komputer memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih aktif antara peserta didik dan materi

pembelajaran melalui berbagai aplikasi dan program yang dirancang secara khusus untuk tujuan pendidikan.

Beberapa bentuk teknologi berbasis komputer antara lain:

- a. Computer Assisted Instruction (CAI).
- b. Multimedia interaktif.
- c. Perangkat lunak edukatif.
- d. Simulasi komputer.
- e. Permainan edukasi (*educational games*).
- f. E-book interaktif.
- g. Aplikasi kuis digital.
- h. Program presentasi interaktif.

Dalam pembelajaran PPKn, teknologi berbasis komputer dapat digunakan untuk menyajikan berbagai materi secara lebih interaktif. Misalnya, peserta didik dapat mempelajari struktur pemerintahan melalui simulasi digital, mengikuti kuis interaktif mengenai nilai-nilai Pancasila, atau menganalisis kasus pelanggaran hak asasi manusia melalui aplikasi pembelajaran berbasis multimedia.

Keunggulan teknologi berbasis komputer antara lain:

- a. Menyediakan pembelajaran yang interaktif.
- b. Memberikan umpan balik secara langsung.

- c. Mendukung pembelajaran individual.
- d. Memfasilitasi pembelajaran mandiri.
- e. Menyajikan materi dalam berbagai format (teks, gambar, audio, video).

Selain itu, teknologi komputer juga memungkinkan guru untuk mengembangkan berbagai model pembelajaran inovatif yang dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran.

4. Teknologi Berbasis Jaringan dan Internet (*Network-Based Technology*)

Perkembangan internet telah melahirkan bentuk teknologi pendidikan yang memungkinkan proses pembelajaran berlangsung tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Teknologi berbasis jaringan merupakan teknologi yang memanfaatkan konektivitas internet untuk mendukung proses pembelajaran.

Anderson (2008) menjelaskan bahwa teknologi berbasis jaringan memungkinkan peserta didik mengakses berbagai sumber belajar secara luas, berkomunikasi dengan guru dan teman sebaya, serta mengikuti pembelajaran secara daring dari lokasi yang berbeda. Contoh teknologi berbasis jaringan meliputi:

- a. Pembelajaran daring (*online learning*).
- b. Pembelajaran jarak jauh (*distance learning*).

- c. Learning Management System (LMS).
- d. Google Classroom.
- e. Moodle.
- f. Microsoft Teams.
- g. Zoom Meeting.
- h. Google Meet.
- i. Platform Massive Open Online Courses (MOOCs).
- j. Perpustakaan digital.
- k. Portal pendidikan online.

Dalam pembelajaran PPKn, teknologi berbasis internet memungkinkan peserta didik untuk mengakses berbagai dokumen kenegaraan, peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, berita aktual, video edukatif, serta sumber belajar lainnya yang berkaitan dengan kehidupan kewarganegaraan.

Guru juga dapat memanfaatkan forum diskusi daring untuk membahas isu-isu sosial dan politik yang sedang berkembang. Melalui diskusi tersebut, peserta didik dapat belajar menyampaikan pendapat secara kritis, menghargai perbedaan pandangan, serta mengembangkan kemampuan argumentasi yang logis dan bertanggung jawab.

Keunggulan teknologi berbasis jaringan antara lain:

- a. Akses informasi yang luas dan cepat.
- b. Fleksibilitas waktu dan tempat belajar.
- c. Mendukung pembelajaran kolaboratif.
- d. Mempermudah komunikasi antara guru dan peserta didik.
- e. Menyediakan berbagai sumber belajar yang beragam.

5. Teknologi Mobile dan Pembelajaran Digital Modern

Selain empat klasifikasi utama tersebut, perkembangan teknologi saat ini juga melahirkan berbagai bentuk teknologi pendidikan modern yang memanfaatkan perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Teknologi ini dikenal sebagai **mobile learning (m-learning)**.

Melalui perangkat mobile, peserta didik dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Berbagai aplikasi pembelajaran, platform digital, serta media sosial edukatif telah menjadi bagian dari ekosistem pembelajaran modern.

Dalam pembelajaran PPKn, teknologi mobile dapat digunakan untuk:

- a. Mengakses e-book PPKn.
- b. Menonton video pembelajaran.
- c. Mengikuti diskusi daring.
- d. Mengerjakan kuis digital.

- e. Membuat proyek kewarganegaraan berbasis media sosial.
- f. Mengikuti webinar atau seminar kebangsaan secara daring.

Perkembangan terbaru bahkan mencakup pemanfaatan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), realitas virtual (*Virtual Reality*), dan realitas tertambah (*Augmented Reality*) yang berpotensi menciptakan pengalaman belajar kewarganegaraan yang lebih imersif dan interaktif.

6. Implikasi Jenis Teknologi Pendidikan terhadap Pembelajaran PPKn

Pemilihan jenis teknologi pendidikan dalam pembelajaran PPKn harus mempertimbangkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Tidak semua teknologi cocok digunakan untuk seluruh materi pembelajaran. Oleh karena itu, guru perlu melakukan analisis kebutuhan sebelum menentukan teknologi yang akan digunakan.

Kombinasi berbagai jenis teknologi pendidikan dapat menghasilkan pembelajaran yang lebih efektif. Misalnya, guru dapat memadukan buku teks sebagai sumber belajar utama, video pembelajaran sebagai media visualisasi, aplikasi komputer sebagai sarana

latihan interaktif, dan internet sebagai sumber informasi tambahan.

Dengan demikian, penggunaan berbagai jenis teknologi pendidikan dalam pembelajaran PPKn dapat membantu menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna, meningkatkan motivasi belajar peserta didik, memperluas akses terhadap sumber belajar, serta mendukung pengembangan kompetensi kewarganegaraan yang dibutuhkan dalam kehidupan abad ke-21.

D. Integrasi Teknologi dalam Perencanaan Pembelajaran

Integrasi teknologi dalam perencanaan pembelajaran merupakan proses menggabungkan penggunaan teknologi dengan berbagai komponen pembelajaran, seperti tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, strategi pembelajaran, media pembelajaran, serta sistem penilaian yang digunakan. Integrasi teknologi tidak hanya dimaknai sebagai penggunaan perangkat digital di dalam kelas, tetapi lebih jauh merupakan upaya sistematis untuk memanfaatkan teknologi sebagai sarana dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran (Mishra & Koehler, 2006).

Pada era digital saat ini, integrasi teknologi menjadi salah satu kebutuhan penting dalam dunia pendidikan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara peserta didik memperoleh informasi, berinteraksi, serta membangun pengetahuan. Oleh karena itu, guru dituntut untuk mampu merancang pembelajaran yang memanfaatkan teknologi secara tepat guna sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan pembelajaran secara efektif, efisien, dan inovatif.

Dalam konteks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), integrasi teknologi memiliki peran yang sangat penting karena dapat membantu guru menyajikan materi pembelajaran secara lebih kontekstual, menarik, dan relevan dengan kehidupan peserta didik. Materi-materi seperti demokrasi, hak asasi manusia, konstitusi, sistem pemerintahan, maupun nilai-nilai Pancasila dapat disajikan melalui berbagai media digital yang mampu meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran.

1. Konsep Integrasi Teknologi dalam Pembelajaran

Integrasi teknologi dalam pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya untuk memanfaatkan teknologi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Teknologi tidak ditempatkan

sebagai pelengkap semata, tetapi menjadi komponen yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran secara optimal.

Menurut Mishra dan Koehler (2006), integrasi teknologi yang efektif terjadi ketika guru mampu menggabungkan tiga aspek utama dalam pembelajaran, yaitu pengetahuan tentang materi yang diajarkan (*content knowledge*), pengetahuan tentang strategi pembelajaran (*pedagogical knowledge*), dan pengetahuan tentang teknologi (*technological knowledge*). Ketiga aspek tersebut harus saling terhubung sehingga penggunaan teknologi benar-benar memberikan nilai tambah terhadap proses pembelajaran.

Integrasi teknologi yang baik ditandai dengan penggunaan teknologi yang sesuai dengan karakteristik materi, kebutuhan peserta didik, serta tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Sebaliknya, penggunaan teknologi yang hanya bersifat formalitas tanpa mempertimbangkan aspek pedagogis sering kali tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas pembelajaran.

2. Pentingnya Integrasi Teknologi dalam Perencanaan Pembelajaran

Perencanaan pembelajaran merupakan tahap awal yang sangat menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Pada tahap ini, guru merumuskan tujuan

pembelajaran, menentukan materi yang akan diajarkan, memilih metode dan media pembelajaran, serta menyusun instrumen evaluasi.

Integrasi teknologi dalam perencanaan pembelajaran menjadi penting karena beberapa alasan berikut:

a. Menyesuaikan Pembelajaran dengan Karakteristik Generasi Digital

Peserta didik saat ini merupakan generasi yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan digital. Mereka terbiasa menggunakan berbagai perangkat teknologi seperti smartphone, komputer, internet, dan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Kondisi tersebut menuntut guru untuk menghadirkan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik agar proses belajar menjadi lebih menarik dan bermakna. Pemanfaatan teknologi dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih dekat dengan pengalaman sehari-hari peserta didik.

b. Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran

Teknologi memungkinkan penyajian materi pembelajaran dalam berbagai bentuk seperti teks, gambar, audio, video, animasi, simulasi, dan multimedia interaktif. Variasi penyajian tersebut dapat

membantu peserta didik memahami materi secara lebih mudah dan mendalam. Dalam pembelajaran PPKn, misalnya, konsep demokrasi dapat dijelaskan melalui simulasi pemilu digital, sementara materi sejarah perumusan Pancasila dapat dipelajari melalui video dokumenter yang menarik.

c. Memperluas Akses terhadap Sumber Belajar

Melalui teknologi, peserta didik dapat mengakses berbagai sumber belajar dari seluruh dunia tanpa dibatasi ruang dan waktu. Internet menyediakan berbagai referensi berupa artikel ilmiah, jurnal, video edukasi, dokumen hukum, arsip sejarah, dan sumber belajar lainnya yang dapat memperkaya wawasan peserta didik.

d. Mendukung Pembelajaran Abad ke-21

Pembelajaran abad ke-21 menekankan pengembangan keterampilan berpikir kritis (*critical thinking*), kreativitas (*creativity*), komunikasi (*communication*), dan kolaborasi (*collaboration*) yang dikenal dengan istilah 4C. Integrasi teknologi dapat mendukung pengembangan keterampilan tersebut melalui berbagai aktivitas pembelajaran yang melibatkan pemecahan masalah, diskusi daring, proyek kolaboratif, serta pemanfaatan media digital.

3. Prinsip-Prinsip Integrasi Teknologi dalam Perencanaan Pembelajaran

Agar penggunaan teknologi memberikan manfaat yang optimal, guru perlu memperhatikan beberapa prinsip dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam perencanaan pembelajaran.

a. Berorientasi pada Tujuan Pembelajaran

Teknologi harus dipilih berdasarkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Guru perlu memastikan bahwa penggunaan teknologi benar-benar mendukung pencapaian kompetensi peserta didik. Misalnya, jika tujuan pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap isu-isu kewarganegaraan, maka penggunaan forum diskusi daring atau analisis berita digital akan lebih relevan dibandingkan sekadar menampilkan presentasi multimedia.

b. Sesuai dengan Karakteristik Materi

Tidak semua materi memerlukan jenis teknologi yang sama. Materi yang bersifat konseptual mungkin lebih efektif disampaikan melalui video atau animasi, sedangkan materi yang memerlukan diskusi dan argumentasi dapat menggunakan platform kolaboratif daring.

c. Memperhatikan Karakteristik Peserta Didik

Guru perlu mempertimbangkan usia, kemampuan digital, gaya belajar, serta kebutuhan peserta didik sebelum memilih teknologi yang akan digunakan. Teknologi yang terlalu kompleks justru dapat menghambat proses pembelajaran.

d. Memperhatikan Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Perencanaan pembelajaran berbasis teknologi harus disesuaikan dengan kondisi sekolah dan peserta didik. Ketersediaan perangkat, akses internet, serta dukungan teknis menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan.

4. Integrasi Teknologi dalam Pembelajaran PPKn Abad ke-21

Pada abad ke-21, pendidikan tidak hanya bertujuan mengembangkan pengetahuan akademik, tetapi juga membentuk warga negara yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang cepat.

Pembelajaran PPKn perlu mengembangkan konsep **kewarganegaraan digital (*digital citizenship*)**, yaitu kemampuan peserta didik untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, etis, dan produktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Melalui integrasi teknologi, peserta didik dapat belajar mengenai etika bermedia sosial, literasi digital, keamanan digital, serta cara menghadapi hoaks dan disinformasi yang banyak ditemukan di ruang digital. Kompetensi tersebut sangat penting bagi warga negara modern yang hidup dalam era informasi.

5. Implikasi Integrasi Teknologi terhadap Perencanaan Pembelajaran PPKn

Integrasi teknologi memberikan implikasi yang signifikan terhadap peran guru dalam perencanaan pembelajaran. Guru tidak lagi hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai fasilitator, desainer pembelajaran, dan pengelola sumber belajar digital.

Guru dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi digital agar mampu merancang pembelajaran yang inovatif dan relevan dengan perkembangan zaman. Selain itu, guru perlu melakukan evaluasi secara berkelanjutan terhadap efektivitas penggunaan teknologi dalam pembelajaran.

Dengan demikian, integrasi teknologi dalam perencanaan pembelajaran PPKn merupakan langkah strategis untuk menciptakan pembelajaran yang lebih efektif, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta

didik abad ke-21. Melalui perencanaan yang matang dan pemanfaatan teknologi yang tepat, pembelajaran PPKn dapat menjadi lebih menarik, kontekstual, dan mampu mengembangkan kompetensi kewarganegaraan yang diperlukan dalam kehidupan demokratis di era digital.

E. Rangkuman

Teknologi pendidikan merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memfasilitasi proses pembelajaran melalui pemanfaatan berbagai sumber dan perangkat teknologi. Teknologi pendidikan tidak hanya berkaitan dengan penggunaan alat atau media teknologi, tetapi juga mencakup proses perencanaan, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta evaluasi sumber belajar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran.

Dalam proses pembelajaran, teknologi pendidikan memiliki peran penting dalam membantu guru menyampaikan materi secara lebih menarik, interaktif, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Pemanfaatan teknologi juga memungkinkan peserta didik memperoleh akses yang lebih luas terhadap berbagai sumber belajar sehingga dapat meningkatkan kualitas proses belajar. Oleh karena itu, guru perlu memiliki kemampuan dalam memanfaatkan teknologi pendidikan sebagai bagian dari perencanaan pembelajaran.

Teknologi pendidikan dalam pembelajaran dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbasis komputer, serta teknologi berbasis jaringan atau internet. Teknologi cetak meliputi buku teks, modul, dan bahan ajar tertulis. Teknologi audiovisual meliputi media yang menggabungkan unsur gambar dan suara seperti video pembelajaran dan presentasi multimedia. Teknologi berbasis komputer memanfaatkan perangkat komputer dan aplikasi pembelajaran, sedangkan teknologi berbasis jaringan memanfaatkan internet dalam kegiatan pembelajaran seperti pembelajaran daring dan penggunaan platform pembelajaran digital.

Integrasi teknologi dalam perencanaan pembelajaran merupakan proses menggabungkan penggunaan teknologi dengan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, serta kegiatan evaluasi. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran harus dirancang secara sistematis agar dapat mendukung tercapainya tujuan pembelajaran secara optimal. Guru perlu mempertimbangkan kesesuaian teknologi dengan materi pembelajaran, ketersediaan sarana dan prasarana, serta kemampuan peserta didik dalam menggunakan teknologi tersebut.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam integrasi teknologi pembelajaran adalah model TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) yang menekankan pentingnya keterpaduan antara pengetahuan materi, pengetahuan pedagogik, dan pengetahuan teknologi. Dengan mengintegrasikan teknologi dalam perencanaan pembelajaran, guru dapat menciptakan pembelajaran yang lebih inovatif, menarik, serta mampu meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

BAB 5

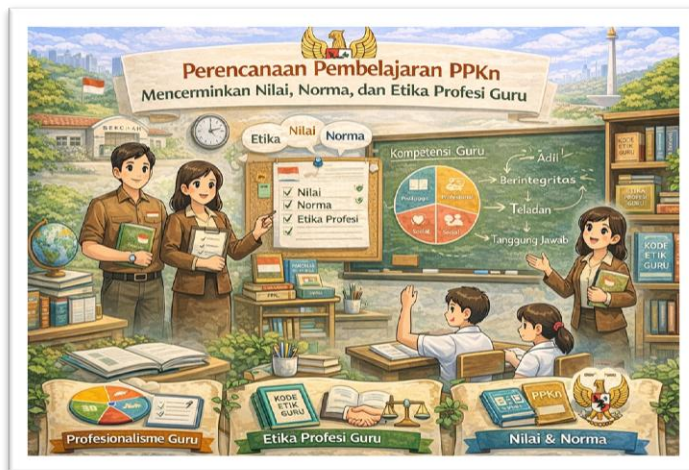
PERENCANAAN PEMBELAJARAN BERBASIS NILAI, NORMA, DAN ETIKA PROFESI GURU

A. Perencanaan Pembelajaran

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Perencanaan Pembelajaran PKn yaitu Mahasiswa mampu merancang perencanaan pembelajaran yang mencerminkan nilai, norma, dan etika profesi guru. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter, sikap, dan kepribadian peserta didik. Dalam proses pendidikan tersebut, guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi pembelajaran, tetapi juga sebagai teladan dalam menanamkan nilai, norma, dan etika kepada peserta didik. Hal ini menjadi sangat penting terutama dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang berkarakter, demokratis, serta memiliki kesadaran terhadap hak dan kewajibannya sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Perencanaan pembelajaran merupakan salah satu tahap penting dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan.

Perencanaan pembelajaran yang baik tidak hanya berfokus pada penyusunan tujuan, materi, metode, dan evaluasi pembelajaran, tetapi juga harus mampu mencerminkan nilai-nilai moral, norma sosial, serta etika profesi guru dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, proses pembelajaran yang dirancang tidak hanya berorientasi pada pencapaian aspek kognitif, tetapi juga mampu mengembangkan sikap dan karakter peserta didik.



Gambar 5. Perencanaan Pembelajaran PPKn

Dalam konteks pembelajaran PPKn, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, serta prinsip-prinsip etika profesi guru harus diintegrasikan dalam perencanaan pembelajaran. Guru perlu merancang kegiatan

pembelajaran yang mampu menumbuhkan sikap toleransi, tanggung jawab, kejujuran, kedisiplinan, serta semangat kebangsaan pada peserta didik. Oleh karena itu, kemampuan guru dalam merancang perencanaan pembelajaran yang berbasis nilai menjadi sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembelajaran PPKn.

Selain itu, guru sebagai tenaga profesional juga terikat oleh kode etik profesi yang mengatur sikap dan perilaku guru dalam menjalankan tugasnya. Kode etik profesi guru menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan pendidikan secara profesional, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Oleh karena itu, dalam merancang perencanaan pembelajaran, guru perlu memperhatikan prinsip-prinsip etika profesi agar pembelajaran dapat berlangsung secara adil, menghargai perbedaan, serta menjunjung tinggi martabat peserta didik.

Bab ini akan membahas mengenai pentingnya integrasi nilai, norma, dan etika profesi guru dalam perencanaan pembelajaran PPKn. Pembahasan dalam bab ini mencakup konsep nilai dan norma dalam pendidikan, etika profesi guru, serta penerapannya dalam perencanaan pembelajaran. Melalui pembahasan pada bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami pentingnya nilai

dan etika dalam pembelajaran serta mampu merancang perencanaan pembelajaran PPKn yang tidak hanya berorientasi pada pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter peserta didik.

B. Profesionalisme Guru

Guru merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan yang memiliki peran strategis dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Dalam melaksanakan tugasnya, guru dituntut untuk memiliki profesionalisme agar mampu menjalankan fungsi pendidikan secara efektif dan bertanggung jawab. Profesionalisme guru berkaitan dengan kemampuan, keahlian, sikap, serta komitmen seorang guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik (Mulyasa, 2013).

Profesionalisme guru tidak hanya ditunjukkan melalui penguasaan materi pelajaran, tetapi juga melalui kemampuan pedagogik, kepribadian yang baik, serta keterampilan sosial dalam berinteraksi dengan peserta didik, sesama guru, dan masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru merupakan pendidik profesional yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan

mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal (UU RI No. 14 Tahun 2005).

Dalam menjalankan profesinya, guru dituntut untuk memiliki empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Kompetensi pedagogik berkaitan dengan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, memahami karakteristik peserta didik, serta merancang proses pembelajaran yang efektif. Kompetensi profesional berkaitan dengan penguasaan materi pembelajaran secara mendalam. Kompetensi kepribadian berkaitan dengan sikap dan perilaku guru yang mencerminkan nilai-nilai moral serta menjadi teladan bagi peserta didik. Sedangkan kompetensi sosial berkaitan dengan kemampuan guru dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial (Sanjaya, 2015).

Profesionalisme guru sangat penting dalam mendukung keberhasilan proses pembelajaran, termasuk dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Guru yang profesional mampu merancang pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan nilai-nilai kebangsaan pada peserta didik.

C. Etika Profesi Guru

Etika profesi guru merupakan seperangkat norma, nilai, dan prinsip moral yang menjadi pedoman bagi guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik. Etika profesi berfungsi sebagai landasan bagi guru dalam bersikap dan bertindak secara profesional serta menjaga martabat profesi guru di masyarakat (Sagala, 2013).

Etika profesi guru tercermin dalam kode etik guru yang mengatur hubungan guru dengan peserta didik, sesama guru, orang tua peserta didik, masyarakat, serta pemerintah. Kode etik guru bertujuan untuk menjaga integritas profesi guru serta memastikan bahwa guru menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral (Usman, 2011).

Dalam hubungannya dengan peserta didik, guru harus bersikap adil, menghargai perbedaan, serta memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh peserta didik tanpa membedakan latar belakang sosial, budaya, agama, maupun kemampuan akademik. Guru juga harus mampu menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman, nyaman, dan kondusif bagi perkembangan peserta didik.

Selain itu, guru juga harus menjaga hubungan profesional dengan sesama rekan sejawat serta menjalin

kerja sama yang baik dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam hubungan dengan masyarakat, guru diharapkan mampu menjadi teladan dalam bersikap dan berperilaku sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi kehidupan sosial. Dengan demikian, etika profesi guru menjadi pedoman penting dalam menjalankan tugas pendidikan secara profesional, bertanggung jawab, dan bermartabat.

D. Perencanaan Pembelajaran Berbasis Etika

Profesi

Perencanaan pembelajaran merupakan proses sistematis yang dilakukan oleh guru untuk merancang kegiatan pembelajaran sebelum proses pembelajaran dilaksanakan. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan tujuan pembelajaran, pemilihan materi pembelajaran, penentuan metode dan strategi pembelajaran, serta penyusunan alat evaluasi pembelajaran (Majid, 2014).

Dalam konteks pendidikan yang berorientasi pada pembentukan karakter, perencanaan pembelajaran tidak hanya berfokus pada pencapaian aspek kognitif, tetapi juga harus memperhatikan aspek afektif dan nilai-nilai moral. Oleh karena itu, guru perlu merancang pembelajaran yang

berbasis pada etika profesi sehingga proses pembelajaran dapat mencerminkan nilai-nilai moral, norma sosial, serta prinsip-prinsip profesionalitas guru.

Perencanaan pembelajaran berbasis etika profesi dapat diwujudkan melalui berbagai cara, antara lain dengan memasukkan nilai-nilai karakter dalam tujuan pembelajaran, menggunakan metode pembelajaran yang menghargai partisipasi peserta didik, serta menciptakan suasana pembelajaran yang demokratis dan inklusif. Guru juga perlu memastikan bahwa proses penilaian dilakukan secara objektif, transparan, dan adil bagi seluruh peserta didik.

Dalam pembelajaran PPKn, penerapan perencanaan pembelajaran berbasis etika profesi menjadi sangat penting karena mata pelajaran ini berfokus pada pembentukan karakter warga negara yang baik. Melalui perencanaan pembelajaran yang berbasis nilai dan etika, guru dapat membantu peserta didik memahami serta menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, norma sosial, serta sikap tanggung jawab sebagai warga negara. Dengan demikian, integrasi etika profesi dalam perencanaan pembelajaran tidak hanya meningkatkan kualitas proses pembelajaran, tetapi juga berperan penting dalam membentuk karakter dan kepribadian peserta didik.

E. Rangkuman

Profesionalisme guru merupakan kemampuan dan sikap yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik secara profesional. Guru yang profesional tidak hanya menguasai materi pembelajaran, tetapi juga memiliki kemampuan pedagogik, kepribadian yang baik, serta kemampuan sosial dalam berinteraksi dengan peserta didik, sesama guru, dan masyarakat. Profesionalisme guru juga tercermin dalam penguasaan empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial.

Etika profesi guru merupakan seperangkat nilai, norma, dan prinsip moral yang menjadi pedoman bagi guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Etika profesi guru bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi guru serta memastikan bahwa guru menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab dan berintegritas. Dalam praktiknya, etika profesi guru tercermin dalam sikap adil terhadap peserta didik, menghargai perbedaan, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, serta menjaga hubungan profesional dengan rekan sejawat dan masyarakat.

Perencanaan pembelajaran berbasis etika profesi merupakan proses merancang kegiatan pembelajaran dengan memperhatikan nilai-nilai moral, norma sosial, serta prinsip-prinsip profesionalitas guru. Dalam perencanaan pembelajaran, guru tidak hanya merancang tujuan, materi, metode, dan evaluasi pembelajaran, tetapi juga perlu mengintegrasikan nilai-nilai karakter dan sikap yang dapat membentuk kepribadian peserta didik.

Dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), perencanaan pembelajaran yang berbasis etika profesi memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila, sikap tanggung jawab, kejujuran, toleransi, serta kesadaran sebagai warga negara yang baik. Dengan demikian, guru tidak hanya berperan sebagai penyampai pengetahuan, tetapi juga sebagai teladan dalam membentuk karakter dan moral peserta didik melalui proses pembelajaran yang dirancang secara profesional dan beretika.

Daftar Pustaka

- Anderson, T. (2008). *The Theory and Practice of Online Learning*. Edmonton: Athabasca University Press.
- Arsyad, A. (2017). *Media Pembelajaran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Budimansyah, D., & Suryadi, K. (2008). *PKn dan Masyarakat Multikultural*. Bandung: Program Studi PKn UPI.
- DePorter, B., & Hernacki, M. (2015). *Quantum Learning*. Bandung: Kaifa.
- Dick, W., & Carey, L. (2015). *The Systematic Design of Instruction*. Boston: Pearson.
- Januszewski, A., & Molenda, M. (2008). *Educational Technology: A Definition with Commentary*. New York: Lawrence Erlbaum Associates.
- Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Majid, A. (2014). *Perencanaan Pembelajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Majid, Abdul. 2014. *Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge. *Teachers College Record*, 108(6).
- Mulyasa, E. (2013). *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Sagala, Syaiful. (2013). *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sanjaya, W. (2015). *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*. Jakarta: Kencana.
- Sanjaya, W. (2017). *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Sanjaya, Wina. 2015. *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*. Jakarta: Kencana.
- Santrock, J. W. (2011). *Educational Psychology*. New York: McGraw Hill.
- Sapriya. (2017). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Seels, B., & Richey, R. (1994). *Instructional Technology: The Definition and Domains of the Field*. Washington DC: AECT.
- Smaldino, S., Lowther, D., & Russell, J. (2014). *Instructional Technology and Media for Learning*. Boston: Pearson.
- Tilaar, H. A. R. (2002). *Perubahan Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.
- Trianto. (2014). *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

- Uno, H. B. (2016). *Perencanaan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Usman, Moh. Uzer. 2011. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Winarno. (2013). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winataputra, U. S. (2015). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Pendidikan Nasional*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Biodata Penulis



Oktana Wahyu Perdana, M.Pd. lahir pada 12 Oktober 1997. Saat ini penulis merupakan Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas PGRI Yogyakarta (UPY). Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di

Universitas PGRI Yogyakarta (UPY), kemudian melanjutkan studi Magister (S2) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).

Sebagai akademisi, penulis memiliki minat dan kompetensi dalam bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Sistem Pemerintahan, Perbandingan Civic, Media Pembelajaran, Pembelajaran Online, serta Perencanaan Pembelajaran PKn. Dalam kegiatan tridarma perguruan tinggi, penulis mengampu berbagai mata kuliah, antara lain Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Media Pembelajaran, Pengantar Pendidikan, Sistem Pemerintahan, Perbandingan Civic, Pembelajaran Online, dan Perencanaan Pembelajaran PKn.

Selain aktif sebagai dosen, penulis juga terlibat dalam kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta publikasi ilmiah di bidang pendidikan kewarganegaraan. Penulis memiliki ketertarikan pada pengembangan inovasi pembelajaran berbasis teknologi digital dan pemanfaatan Artificial Intelligence (AI)

dalam pendidikan, khususnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Melalui berbagai karya ilmiah dan buku yang ditulis, penulis berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi pembelajaran, dan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

Perencanaan Pembelajaran PKn

Oktana Wahyu Perdana, M.Pd.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memegang peran yang sangat strategis dalam membentuk generasi muda yang cerdas, berkarakter, demokratis, dan memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Dalam mewujudkan tujuan besar tersebut, perencanaan pembelajaran yang matang menjadi kunci utama karena menentukan arah, proses, dan keberhasilan pembelajaran di kelas. Buku **“Perencanaan Pembelajaran PKn”** hadir sebagai panduan komprehensif bagi para pendidik untuk merancang pengalaman belajar yang bermakna, sistematis, dan efektif.

Buku ini membahas secara mendalam berbagai aspek penting dalam perencanaan pembelajaran PPKn, mulai dari hakikat dan landasan filosofis, dinamika perkembangan kurikulum, penyusunan Capaian Pembelajaran (CP) dan Tujuan Pembelajaran (TP), hingga pengembangan perangkat serta asesmen pembelajaran. Menjawab tantangan era digital, buku ini juga mengulas strategi dan model pembelajaran inovatif, pemanfaatan teknologi pendidikan, serta pengembangan kompetensi digital citizenship guna melatih keterampilan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi peserta didik.

Disajikan secara sistematis dan relevan dengan tuntutan pendidikan abad ke-21, buku ini menjadi referensi esensial bagi mahasiswa, guru, calon guru, dosen, maupun praktisi pendidikan. Miliki buku ini sebagai mitra terbaik Anda dalam merancang pembelajaran PPKn yang inspiratif, adaptif, dan berdaya ubah demi meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.



IKAPI
IKATAN PENERBIT INDONESIA

UPY Press

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Unit 4 Lantai 4
Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Yogyakarta
Telp (0274) 376808, 373198, 418077, Fax (0274) 376808
Email: upypress@gmail.com, Web: upypress.upy.ac.id

